

**DAMPAK PEMBANGUNAN JALUR JALAN
LINTAS SELATAN TERHADAP *OUTPUT*
SEKTOR PRODUKSI DAN PENDAPATAN
RUMAH TANGGA JAWA TENGAH
(Simulasi SNSE Jawa Tengah 2004)**



TESIS

untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Sarjana S-2

Program Studi
Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Sudaryadi
C4B005116

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
Desember
2007**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum / tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 8 Desember 2007

Sudaryadi

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of Southern Road Path (Jalur Jalan Lintas Selatan, JJLS) development towards output in production sector and household income in Central Java. The secondary data of Social Accounting Matrix of central java (year 2004) was used the data based.

Simulation was invoked to proceed the cost of JJLS development as a shock towards multiplier accounting matrix.

The results indicated that (1) JJLS development gives a significant impact to the growth of mining, manufacturing industry except for food processing, electricity, gas and water supply and agriculture, husbandary, fishing, food industry; to uplift household,s income of urban society.

In addition, the increase of output in production sector and the improvement in social welfare due to JJLS development might not incur the disparity of household income of central java.

Keywords : *Southern Road Path, Social Accounting Matrix, Sectoral Output, Household Income, Multiplier Accounting.*

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) terhadap *output* sektor produksi dan pendapatan rumah tangga Jawa Tengah. Data yang digunakan untuk melakukan analisis adalah Sistem Nercara Sosial Ekonomi (SNSE) Jawa Tengah 2004.

Metode simulasi yang dilakukan adalah menggunakan biaya pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan sebagai injeksi (*shock*) terhadap matriks angka pengganda neraca (Ma).

Hasil analisis menunjukkan bahwa pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) memberikan dampak bagi : (1) peningkatan *output* yang relatif lebih besar bagi sektor produksi pertambangan, industri pengolahan kecuali makanan, listrik, gas dan air minum serta pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, industri makanan. (2) peningkatan pendapatan yang relatif besar bagi kelompok rumah tangga menengah – atas dan rumah tangga perkotaan.

Peningkatan *output* sektor produksi dan peningkatan pendapatan rumah tangga yang diakibatkan adanya pembangunan JJLS tidak menimbulkan pengaruh pada peningkatan tingkat kesenjangan pendapatan rumah tangga Jawa Tengah.

Kata Kunci : Jalur Jalan Lintas Selatan, SNSE, Output Sektor Produksi, Pendapatan Rumah Tangga, Angka Pengganda Neraca

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul Dampak Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Terhadap Output Sektor Produksi dan Pendapatan Rumah Tangga Jawa Tengah (Simulasi SNSE Jawa Tengah 2004).

Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan program Pasca Sarjana (S2) Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam menyusun tesis ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, dan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Dwisetia Poerwono, MSc, selaku Ketua Program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro
2. Ibu Prof. Dr. Indah Susilowati MS, selaku Dosen Pembimbing Utama.
3. Bapak Firmansyah SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing Pendamping
4. Bapak Prof. Dr. Miyasto, selaku Dosen Penguji I
5. Bapak Dr. Edy Yusuf AG, MSc, selaku Dosen Penguji II
6. Bapak Achma Hendra Setiawan SE, M.Si, selaku Dosen Penguji III
7. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Program Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro
8. Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA Jawa Tengah
9. Ibuku dan saudara-saudaraku tercinta yang telah memberikan dukungan untuk melanjutkan kuliah S2.
10. Teman-teman mahasiswa MIESP Angkatan XI

11. Adi Kurniawan, terima kasih banyak atas segala bantuan dan dukunganmu, tanpa dirimu aku tidak mungkin bisa mewujudkan obsesiku.
12. ESA meskipun kita sekarang berseberangan prinsip tapi aku harus mengakui bahwa kamulah yang telah membuka kesempatan itu buat aku
13. Irwan, terima kasih atas segala *support* nya dan literturnya
14. Semua pihak yang telah mendukung dan membantu proses pembuatan Tesis ini.

Akhirnya semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan serta pihak-pihak yang membutuhkannya.

Semarang, 8 Desember 2007

Sudaryadi

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Halaman Pernyataan	iii
<i>Abstract</i>	iv
Abstraksi	v
Kata Pengantar	vii
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah Penelitian	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Manfaat Penelitian	11
1.5. Sistematika Penulisan	11
Bab II Tinjauan Pustaka	13
2.1. Pembangunan Ekonomi	13
2.2. Peranan Pemerintah Dalam Perekonomian	15
2.3. Pembangunan Ekonomi Daerah.	17
2.4. Kontribusi Infrastruktur Terhadap PDB	18
2.5. Strategi Penentuan Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Sektoral dan Kewilayahan	19
2.6. Peranan Infrastruktur Jalan Dalam Pembangunan Ekonomi	21
2.7. Sistem Jaringan Jalan dan Klasifikasi Jalan	22
2.8. Teori Distribusi Pendapatan	23

2.9. Distribusi Fungsional	24
2.10. Fungsi Produksi Leontief	27
2.11. Sistem Neraca Sosial Ekonomi	29
2.12. Penelitian Terdahulu	31
2.13. Kerangka Pemikiran Teoritis	33
2.14. Hipotesis	36
Bab III Metode Penelitian	37
3.1. Jenis dan Sumber Data	37
3.2. Definisi Operasional Variabel	38
3.3. Batasan Penelitian	39
3.4. Kerangka Alur Penelitian	40
3.5. Teknik Analisa	41
3.6. Kerangka Dasar SNSE	41
3.6.1. Model Pengganda Neraca	44
3.6.2. Dekomposisi Pengganda	45
3.6.3. Pengganda Transfer	46
3.6.4. Pengganda <i>Open Loop</i>	47
3.6.5. Pengganda <i>Close Loop</i>	51
3.7. Metode Simulasi	51
3.8. Uji Hipotesis	
Bab IV Gambaran Umum Obyek Penelitian	53
4.1. Latar Belakang Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah	53
4.2. Aspek Legal Formal Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah	54
4.3. Rute Lintasan Jaringan Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah	56
4.4. Pembiayaan Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah	58

Bab V	Hasil dan Pembahasan	59
5.1.	Keluaran (<i>Output</i>) Kegiatan Sektor Produksi Provinsi Jawa Tengah 2004	59
5.2.	Pendapatan Rumah Tangga Jawa Tengah 2004	60
5.3.	Analisis Data dan Pembahasan	62
5.3.1.	Analisis Tekanan Global Sektor Produksi Jawa Tengah	62
5.3.2.	Analisis Tekanan Global Pendapatan Rumah Tangga Jawa Tengah	64
5.3.3.	Analisis Dekomposisi Matriks	66
5.3.4.	Simulasi Analisis Dampak Pembangunan Fisik Jalur Jalan Lintas Selatan Terhadap <i>Output</i> Kegiatan Sektor Produksi di Jawa Tengah	74
5.3.5.	Simulasi Analisis Dampak Pembangunan Fisik Jaringan Jalan Lintas Selatan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Di Jawa Tengah	76
5.3.6.	Simulasi Analisis Dampak Pembangunan Fisik Jaringan Jalan Lintas Selatan Terhadap Tingkat Kesenjangan Pendapatan Rumah Tangga Di Jawa Tengah	79
Bab VI	Penutup	80
6.1.	Kesimpulan	80
6.2.	Rekomendasi	81
6.3.	Keterbatasan Studi	103
Daftar Pustaka		104

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1. Perkembangan PDRB Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa Menurut Harga Konstan Tahun Dasar 1993, 1999-2004	4
Tabel 1.2. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi Berdasarkan Harga Konstan Tahun Dasar 1993, 2000-2003	4
Tabel 1.3. Penduduk Miskin Di Jawa Tengah Tahun 2002 – 2004	5
Tabel 4.1. Panjang Jalan dan Biaya JJLS Menurut Kabupaten	58
Tabel. 5.1. Output Kegiatan Sektor Produksi Komoditas Domestik Jawa Tengah	59
Tabel. 5.2. Total Pendapatan Dan Pengeluaran Menurut Golongan Rumah Tangga Propinsi Jawa Tengah , 2004	61
Tabel. 5.3. Angka Pengganda Global Yang Diterima Sektor Produksi Jawa Tengah 2004	63
Tabel.5.4. Angka Pengganda Global Yang Diterima Rumah Tangga Jawa Tengah	65
Tabel.5.5. Angka Pengganda Tranfer Yang Diterima Rumah Tangga Jawa Tengah	67
Tabel.5.6. Tekanan Tranfer Yang Diterima Rumah Tangga Jawa Tengah	68
Tabel.5.7. Angka Pengganda <i>Open Loop</i> Yang Diterima Rumah Tangga Jawa Tengah	70
Tabel 5.8. Tekanan Pengganda <i>Open Loop</i> Yang Diterima Rumah Tangga Jawa Tengah	71
Tabel 5.9. Angka Pengganda <i>Close Loop</i> Yang Diterima Rumah Tangga Jawa Tengah	73
Tabel 5.10. Tekanan Pengganda <i>Close Loop</i> Yang Diterima Rumah Tangga Jawa Tengah	74

Tabel 5.11. Hasil Perhitungan Analisis Dampak Pembangunan Fisik JJLS Terhadap Output Kegiatan Sektor Produksi Jawa Tengah	75
Tabel 5.12. Hasil Perhitungan Analisis Dampak Pembangunan Fisik JJLS Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Di Jawa Tengah	77
Tabel 5.13. Share Distribusi Pendapatan Masing-Masing Golongan Rumah Tangga	78

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1. Distribusi Pendapatan Fungsional Dalam Sebuah Perekonomian Pasar	26
Gambar 2.2. Grafik Fungsi Produksi Leontief	28
Gambar 2.3. Transaksi Antar Blok Dalam SNSE	30
Gambar 2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis	35
Gambar 3.1. Struktur Pengganda	49
Gambar 4.1. Peta Jaringan Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah	58
Gambar 5.1. Pengaruh Open Loop Injeksi Pada Institusi Terhadap Kegiatan Ekonomi	69
Gambar.5.2. Pengaruh Close Loop Injeksi Pada Institusi Terhadap Kegiatan Ekonomi	72

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
Lampiran 1. SNSE Jawa Tengah 2004 27 x 27	87
Lampiran 2. Angka Pengganda Multiplier Accounting	93
Lampiran 3. Angka Pengganda Global Sektor Produksi	94
Lampiran 4. Angka Pengganda Global Rumah Tangga	95
Lampiran 5. Analisis Dekomposisi Matriks	96
Lampiran 6. Perhitungan Test Statistik	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur mempunyai peranan yang vital dalam pemenuhan hak dasar rakyat. Infrastruktur adalah katalis pembangunan. Ketersediaan infrastruktur dapat memberikan pengaruh pada peningkatan akses masyarakat terhadap sumberdaya sehingga meningkatkan akses produktivitas sumberdaya yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi (Joyo Winoto dan Hermanto Siregar, 2006).

Infrastruktur atau prasarana dan sarana fisik, di samping memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan juga terhadap proses pertumbuhan ekonomi suatu wilayah atau *region*. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan indikasi bahwa wilayah yang memiliki kelengkapan sistem infrastruktur lebih baik biasanya mempunyai tingkat kesejahteraan sosial dan kualitas lingkungan serta pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pula (Departemen Pekerjaan Umum, 2006).

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai apabila tidak ada ketersediaan infrastruktur yang memadai atau dengan kata lain infrastruktur merupakan *basic determinant* atau kunci bagi perkembangan ekonomi.

Seperti halnya infrastruktur dalam pengertian luas, jalan adalah salah satu infrastruktur yang sangat penting guna menunjang kegiatan ekonomi. Dalam konteks pembangunan pertanian dan ekonomi pedesaan secara umum, jaringan jalan merupakan infrastruktur wilayah yang sangat dibutuhkan untuk kelancaran arus faktor produksi maupun pemasaran hasil produksi (Tulus Tambunan dan Kadin, 2006).

Secara tidak langsung, keberadaan infrastruktur jalan akan mendukung produktivitas sektor ekonomi lainnya sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial-budaya kehidupan masyarakat melalui efek berganda. Sedangkan secara langsung terkait sektor konstruksi, infrastruktur jalan juga akan menciptakan kesempatan kerja dan usaha. Oleh karena itu, keberadaan infrastruktur jalan yang baik akan dapat mendorong terciptanya stabilitas berbagai aspek dalam masyarakat guna menunjang laju pembangunan nasional (Departemen Pekerjaan Umum, 2006).

Menurut studi yang dilakukan oleh Danareksa, melalui pemanfaatan tabel *input-output* menyebutkan bahwa setiap pembangunan 100 kilometer jalan akan memberikan tambahan 0,20 persen terhadap pertumbuhan ekonomi dan menciptakan 69.000 lapangan kerja baru (Purbayu dan Edwin S, 2004). Sementara hasil kajian yang dilakukan oleh Pusat Kajian Kebijakan Sekjen Kimpraswil tersimpulkan bahwa peningkatan penghematan biaya perjalanan sebesar 1 persen akibat meningkatnya kualitas jalan dapat meningkatkan PDRB rata-rata sebesar 0,99 persen (Puska, 2004).

Ketidakmerataan penyebaran infrastruktur jalan baik menurut ukuran volume ataupun tingkat kualitasnya merupakan permasalahan lama yang perlu segera diatasi agar pemerataan pembangunan di daerah dan kesejahteraan masyarakat di daerah dapat tercipta (Joyo Winoto dan Hermanto Siregar, 2006). Ini tidak bisa dipungkiri karena masalah pembangunan di daerah berawal dari ketiadaan infrastruktur jalan yang memadai.

Rendahnya kualitas jalan di sejumlah wilayah tertinggal secara empiris lebih banyak disebabkan kendala struktural, yaitu belum diprioritaskannya wilayah tersebut karena dianggap belum memberikan dampak secara langsung bagi peningkatan PAD atau belum optimalnya dukungan pada sektor terkait.

Wilayah tertinggal yang seharusnya mampu berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi regional menjadi kurang berkembang karena kurangnya akses ke daerah tersebut. Kurangnya fasilitas jalan membuat wilayah tertinggal menjadi “jauh” dari “pasar”, sehingga sulit berkembang untuk menjadi sentra produksi (Purbayu dan Edwin S, 2004). Jika ini dibiarkan terus, maka rendahnya kinerja perekonomian wilayah serta persoalan kemiskinan struktural tidak akan pernah teratasi karena menurut strukturnya jumlah orang miskin terbesar justru berada di pedesaan (Joyo Winoto dan Hermanto Siregar, 2006).

Pemerintah provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana pembangunan di daerah Jawa Tengah juga masih dihadapkan pada permasalahan tentang bagaimana memacu pertumbuhan ekonomi wilayah serta untuk mengatasi persoalan kemiskinan. Dua persoalan tersebut hingga saat ini masih menjadi permasalahan regional bagi perekonomian provinsi Jawa Tengah, karena kenyataannya dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Pulau Jawa, PDRB provinsi Jawa Tengah baik di lihat dari sisi nilai maupun tingkat pertumbuhannya relatif lebih rendah.

Tabel 1.1. Perkembangan PDRB Provinsi-Provinsi Di Pulau Jawa Menurut Harga Konstan Tahun Dasar 1993, Periode Tahun 1999 - 2003

Provinsi	1999	2000	2001	2002	2003
	(Rp. Juta)	(Rp. Juta)	(Rp. Juta)	(Rp. Juta)	(Rp. Juta)
DKI. Jakarta	57,215,224	59,694,419	61,868,256	64,338,830	67,162,699
Jawa Timur	55,393,853	56,856,521	58,750,180	60,754,056	63,252,167
Jawa Barat	55,266,773	55,660,204	58,311,798	60,594,235	63,179,491
DI. Yogyakarta	4,824,391	5,017,709	5,186,665	5,395,052	5,615,557
Jawa Tengah	39,394,514	40,941,667	42,305,176	43,775,693	45,557,109

Sumber : PDRB Propinsi-Propinsi di Indonesia, BPS 1993-1998.

Tabel 1.2. Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Provinsi Berdasarkan Harga Konstan Tahun dasar 1993, Periode 2000-2003

Provinsi	2000	2001	2002	2003
	(%)	(%)	(%)	(%)
DKI. Jakarta	4.33	3.64	3.99	4.39
Jawa Timur	2.64	3.33	3.41	4.11
Jawa Barat	3.71	4.76	3.91	4.27
D.I. Yogyakarta	4.01	3.37	4.02	4.09
Jawa Tengah	3.93	3.33	3.48	4.07

Sumber : PDRB Propinsi-Propinsi di Indonesia, BPS 1999-2003 (diolah)

Begitu juga terhadap persoalan kemiskinan, meskipun cenderung mengalami penurunan pada tiap tahunnya, tetapi selama tahun 2002-2004 jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah masih mencapai seperlima dari jumlah penduduk provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.3.
Penduduk Miskin di Jawa Tengah Tahun 2002 – 2004

Tahun	Batas Kemiskinan (Rp/Kap/bln)	Jumlah Pddk Miskin (1000 org)	Persentase Pddk Miskin (%)
2002	106.438	7.308,30	23,06
2003	119.403	6.979,80	21,78
2004	126.651	6.843,80	21,11

Sumber : Jawa Tengah Dalam Angka 2004.

Salah satu permasalahan dasar dan sekaligus merupakan hambatan teknis bagi provinsi Jawa Tengah guna memacu pertumbuhan ekonomi wilayah adalah belum meratanya infrastruktur jalan, terutama di wilayah selatan Jawa Tengah. Dibandingkan dengan wilayah utara Jawa Tengah, kabupaten-kabupaten di wilayah selatan Jawa Tengah hingga saat ini belum terhubung dalam satu sistem jalan arteri provinsi. Jaringan jalan yang digunakan untuk menghubungkan kabupaten-kabupaten di wilayah selatan Jawa Tengah adalah jalan *Deandels* yang secara teknis sudah tidak dapat mendukung dinamika perkembangan wilayah.

Kondisi teknis jalan *Deandels* hanya dapat dipakai untuk dua jalur dengan nilai perbandingan antara volume dengan kapasitas atau VCR (*volume capacity ratio*) sebesar 0,85. Nilai VCR ini sudah berada di atas nilai ambang batas yang diidealkan yaitu 0,75, sehingga kecepatan rata-rata kendaraan yang melintas di jalan ini rata-rata di bawah 50 km/jam. Oleh karena itu jika tidak segera dicari solusi pemecahannya maka diproyeksikan pada tahun 2009, jalan *Deandels* akan mengalami titik jenuh (Tatrawil Jawa Tengah Tahun 2003-2008, 2003).

Kondisi ini sangat berbeda dengan wilayah utara Jawa Tengah, dengan ketersediaan infrastruktur jalan yang lebih memadai, aktivitas ekonomi, mobilitas dan kontak sosial antar penduduk di wilayah utara lebih tinggi intensitasnya. Karena hampir semua jalan kabupaten/kota yang ada di sepanjang wilayah pantai utara telah terkoneksi dengan jalan arteri pantai utara (pantura) dan membentuk sistem jalan arteri provinsi.

Keberadaan jalan arteri pantura ini benar-benar mendukung akselerasi kegiatan ekonomi wilayah dan menggerakkan potensi regional maupun sektoral yang ada di wilayah utara. Wilayah utara Jawa Tengah lebih memiliki daya tarik bagi lintasan distribusi barang dan jasa serta dipilih sebagai pusat-pusat kegiatan ekonomi, karena memiliki tingkat efisiensi yang lebih baik (Bina Marga Jawa Tengah, 2006).

Guna mengurangi konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah utara Jawa Tengah serta untuk mendayagunakan potensi sektoral di wilayah selatan, pemerintah provinsi Jawa Tengah membangun Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Jawa Tengah. Aspek

yuridis formal yang menjadi dasar hukum pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan ini adalah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 tahun 2006.

Dengan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi yang ada di wilayah selatan, antara lain untuk : menunjang distribusi yang akan melalui Pelabuhan Tanjung Intan, menumbuhkan investasi dan peluang kerja yang ada di wilayah selatan Jawa Tengah, mempermudah dan memperlancar aksesibilitas antar moda di wilayah selatan Jawa Tengah, membuka peluang pendekatan regionalisasi desentralistik yang merupakan inovasi dalam memperkaya pembangunan ekonomi daerah dengan mengedepankan komunikasi antar kabupaten untuk membangun kemitraan dalam mendorong perekonomian secara sinergis (Bina Marga Jawa Tengah, 2006).

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan Tim Kajian Perencanaan Teknis dan Desain Jalur Jalan Lintas Selatan dari Bina Marga Provinsi Jawa Tengah, di wilayah selatan sebenarnya terdapat sejumlah potensi sektoral yang tidak kalah dengan wilayah utara. Potensi sektoral tersebut meliputi potensi sektor industri, pertanian dan pariwisata yang tersebar di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo dan Wonogiri.

Terdapat beberapa faktor yang menentukan kinerja perekonomian suatu daerah guna mencapai pertumbuhan ekonomi, mewujudkan pemerataan dan menanggulangi kemiskinan. Salah satunya yang sangat efektif adalah kebijakan yang dipilih (*policy choice*) dan strategi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (Suharto, 2001).

Dengan demikian kebijakan pengalokasian pembiayaan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah adalah strategi pembangunan yang dilakukan pemerintah provinsi Jawa Tengah guna mendorong kinerja perekonomian daerah. Sedangkan seberapa besar dampak yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut, inilah yang perlu dianalisis lebih lanjut sebagai satu kajian.

Perekonomian merupakan sistem keterkaitan aktivitas ekonomi dari para pelaku ekonomi dan kegiatan antar sektor yang ada di sebuah wilayah. Perubahan aktivitas yang dilakukan oleh salah satu pelaku ekonomi atau terjadi pada suatu sektor akan memberikan dampak keterkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian secara menyeluruh.

Dewasa ini metode yang cukup efektif untuk mengidentifikasi dan mengukur keterkaitan kegiatan ekonomi antar sektor dalam sebuah sistem perekonomian adalah melalui pemanfaatan data Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). SNSE adalah matriks yang merakum secara rinci keseluruhan transaksi yang dilakukan para pelaku ekonomi pada sebuah sistem perekonomian. Karena merupakan neraca transaksi ekonomi maka setiap terjadi satu perubahan aktivitas ekonomi hal itu akan memberikan pengaruh terhadap kinerja sektor lainnya secara menyeluruh.

Penggunaan matrik SNSE pada penelitian yang mengkaji fenomena perekonomian daerah, akan dapat membantu dalam merumuskan kebijakan ekonomi bagi suatu daerah. Karena dengan SNSE besarnya keterkaitan antar institusi ekonomi dan arah keterkaitannya dapat ditelusuri baik secara langsung maupun tidak langsung (Socia Prihawantoro, 2002).

Berangkat dari pemilihan materi kajian mengenai dampak pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah terhadap kinerja perekonomian Jawa Tengah maka judul tesis yang dijadikan studi penelitian oleh penulis adalah **“Dampak Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Terhadap *Output* Sektor Produksi Dan Pendapatan Rumah Tangga Di Jawa Tengah”**.

1.2. Perumusan Masalah Penelitian

Dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di pulau Jawa, nilai *output* maupun laju pertumbuhan ekonomi provinsi Jawa Tengah relatif paling rendah. Di samping persoalan tersebut, masalah regional yang masih harus menjadi perhatian pemerintah provinsi Jawa Tengah adalah mengatasi persoalan kemiskinan. Meskipun selalu mengalami penurunan pada tiap tahunnya, namun proporsi jumlah penduduk miskin Jawa Tengah masih cukup tinggi yakni sebesar seperlima jumlah penduduk Jawa Tengah.

Salah satu permasalahan mendasar yang menyebabkan mengapa hal ini masih terjadi, karena di wilayah selatan Jawa Tengah belum terdapat infrastruktur jalan arteri provinsi yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi wilayah bagi kabupaten-kabupaten di wilayah selatan Jawa Tengah. Kesenjangan infrastruktur jalan inilah yang mengakibatkan potensi daerah Jawa Tengah khususnya di wilayah selatan tidak dapat terkelola secara optimal bagi kepentingan pembangunan ekonomi.

Guna mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah serta untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata, pemerintah provinsi Jawa Tengah berupaya membangun infrastruktur sistem jalan arteri di wilayah selatan Jawa Tengah yang dinamakan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah. Dengan adanya jalan arteri ini diharapkan potensi regional dan sektoral yang ada di wilayah selatan Jawa Tengah dapat semakin memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat Jawa Tengah.

Berdasarkan uraian di atas maka rumusan permasalahan penelitian yang relevan menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Bagaimana dampak pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah terhadap *output* kegiatan sektor produksi di Jawa Tengah ?
2. Bagaimana dampak pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah terhadap pendapatan rumah tangga di Jawa Tengah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berangkat dari pemahaman bahwa Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) merupakan metode analisis yang mampu mendeteksi keterkaitan antar sektor dalam suatu sistem perekonomian maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Menganalisis dampak pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah terhadap *output* kegiatan sektor produksi dan pendapatan rumah tangga di Jawa Tengah.

2. Menganalisis tingkat kesenjangan pendapatan rumah tangga di Jawa Tengah antara sebelum dan sesudah pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Sebagai masukan atau bahan pemikiran bagi pembuat perencanaan/kebijakan pembangunan di provinsi Jawa Tengah, terutama berkaitan dengan strategi pembangunan infrastruktur wilayah guna mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi daerah.
2. Sebagai sumber data atau kerangka acuan bagi penelitian lanjutan sejenis yakni menggunakan data SNSE atau penelitian yang relevan dengan topik yaitu untuk menganalisis peranan infrastruktur jalan terhadap pembangunan ekonomi.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas :

BAB I PENDAHULUAN :

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS :

Bab ini menguraikan tentang landasan teori, tinjauan atas penelitian-penelitian yang terkait dan relevan terhadap topik penelitian serta hipotesa yang diajukan

penulis. Penggunaan landasan teori dimaksudkan untuk memberikan dasar-dasar pemikiran dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN :

Pada bab ini akan diuraikan tentang jenis dan sumber data yang digunakan, definisi operasional variabel, batasan penelitian, kerangka alur penelitian dan teknik analisa data. Pada bab ini diuraikan juga mengenai kerangka dasar Sistem Neraca Sosial Ekonomi sebagai alat analisis.

BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN :

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah, landasan yuridis pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah, rute dan panjang Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah dan biaya pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah.

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN :

Pada bab ini berisi tentang deskripsi dari hasil analisa/perhitungan data dan pembahasan hasil analisis yang dikaitkan dengan tujuan penelitian serta hipotesa yang diajukan.

BAB VI PENUTUP :

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi yang diajukan penulis berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1. Pembangunan Ekonomi

Menurut G. Meier (1995), pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai sebuah proses untuk meningkatkan pendapatan per kapita riil dalam jangka panjang dengan mendasarkan pada tujuan untuk mengurangi jumlah angka garis kemiskinan absolut dan tingkat kesenjangan pendapatan.

Pembangunan ekonomi tidak sekedar pertumbuhan ekonomi. Pembangunan berarti adanya pertumbuhan dan perubahan. Dengan demikian terdapat pengertian atau dimensi yang mendasar serta lebih luas dalam proses pembangunan yang merupakan lanjutan dari pertumbuhan atau peningkatan satu perekonomian. Adanya proses pembangunan ekonomi juga dapat ditunjukkan dari meningkatnya kinerja faktor produksi dan teknik produksi yang lebih baik. Juga dapat ditunjukkan dari pembangunan kelembagaan serta perubahan mental dan nilai kelembagaan.

Pembangunan ekonomi juga tidak hanya upaya penggabungan sejumlah industri, tetapi merupakan pencapaian sejumlah nilai-nilai modernitas secara ideal yang mencakup peningkatan produktivitas, keseimbangan sosial-ekonomi, penguasaan ilmu pengetahuan yang lebih modern, perbaikan kelembagaan dan mental, serta adanya sistem koordinasi yang lebih rasional dalam merumuskan

ukuran-ukuran kebijakan, yang semua itu merupakan hal-hal yang harus segera dilembagakan di negara berkembang.

Sedangkan menurut Todaro, tujuan pembangunan adalah:

1. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi dari barang kebutuhan pokok (*basic life-sustaining goods*), yakni, pangan, pakaian, kesehatan dan perlindungan.
2. Meningkatkan taraf hidup (*level of living*), termasuk peningkatan pendapatan, ketersediaan lapangan pekerjaan, pendidikan yang lebih baik dan perhatian yang besar terhadap nilai-nilai kemanusiaan (*self-esteem*).
3. Memperluas jangkauan ketersediaan kebutuhan individu dan masyarakat melalui perbaikan dalam pola kerja dan menghindarkan masyarakat dari tekanan dan kesengsaraan hidup.

Beberapa indikator yang sering digunakan dalam melihat keberhasilan pembangunan pada sebuah negara antara lain adalah angka harapan hidup (*life expectation*), tingkat konsumsi protein per kapita, rasio pendaftaran sekolah dan tingkat konsumsi energi (Todaro, 1989).

Secara tradisional, pembangunan ekonomi diartikan sebagai gejala terjadinya peningkatan Produk Nasional Bruto (PNB) dan atau peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Pembangunan ekonomi juga ditunjukkan dengan adanya perubahan (*planned alteration*) dari struktur kegiatan produksi serta tenaga kerja yang bergerak di sektor pertanian ke sektor industri manufaktur dan jasa. Hal inilah yang mendasari teori perubahan struktural. Lebih jauh lagi, pembangunan ekonomi harus mampu mengurangi atau menghapus kemiskinan,

ketidakmerataan dan pengangguran, definisi ini sering kita sebut sebagai *redistributuion from growth*.

Kesalahan besar pembangunan ekonomi yang hanya bertumpu pada pertumbuhan saja adalah diabaikannya masalah distribusi pendapatan. Studi yang pernah dilakukan oleh Irma Aldelman dan C.Taft Morris pada tahun 1973, serta Hollis B.Chenery dan kawan-kawan pada tahun 1974, menunjukkan kelemahan dari konsep pembangunan tersebut. Oleh karena itu sejak awal dasawarsa 70-an teori pembangunan ekonomi mulai memberikan perhatian pada masalah distribusi pendapatan. Tujuan pembangunan ekonomi tidak lagi hanya mencapai PDB atau Pendapatan nasional yang tinggi, namun harus diikuti dengan pemerataan hasil-hasil yang telah dicapai (*growth with redistribution*). Namun, bila dikaji lebih lanjut model pertumbuhan dengan pemerataan tadi tak lebih hanya merupakan perbaikan dari model lama. Persepsi desain dan instrumen dalam model baru itu masih tetap menggunakan apa yang dipakai oleh model lama. Maka, yang dapat dilakukan adalah memasukkan unsur pemerataan tadi ke dalam sektor pembangunan yang ditangani pemerintah. Hal ini tidak terlalu sukar dikerjakan, mengingat peranan pemerintah dalam proses pembangunan di negara-negara berkembang pada umumnya sangat besar (Todaro, 1989).

2.2. Peranan Pemerintah Dalam Perekonomian

Dalam dinamika pengelolaan sistem perekonomian, pemerintah mengemban fungsi pokok ekonomi, yaitu menggunakan kebijakan fiskal guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas jangka panjang serta menjinakkan

berbagai eksese negatif siklus usaha seperti inflasi dan pengangguran (Paul, A. Samuelson, 1992).

Sebagai sebuah organisasi atau rumah tangga, pemerintah melakukan banyak sekali pengeluaran untuk membiayai kegiatan-kegiatannya. Pengeluaran-pengeluaran tersebut bukan saja untuk menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, akan tetapi juga untuk membiayai kegiatan perekonomian. Bukan berarti pemerintah turut berbisnis, melainkan dalam arti pemerintah harus menggerakkan dan merangsang kegiatan ekonomi secara umum. Pemerintah harus merintis dan menjalankan kegiatan ekonomi yang masyarakat atau kalangan swasta tidak tertarik untuk menjalankannya. Dalam kasus ini, pemerintah memandang perlu untuk menangani sendiri berbagai kegiatan ekonomi tertentu, yang menurut penilaiannya sebaiknya tidak dijalankan oleh pihak swasta.

Di negara manapun, selalu ada campur tangan atau intervensi pemerintah dalam perekonomian. Tidak ada pemerintahan yang dalam percaturan ekonomi negerinya berperan semata-mata hanya sebagai wasit atau polisi, yang hanya berfungsi membuat undang-undang dan peraturan, untuk kemudian menjadi pelerai jika timbul masalah atau penyelamat bila terjadi kepanikan. Keterlibatan pemerintah dalam perekonomian jelas beralasan, mustahil untuk dicegah. Tidak ada perekonomian pun, termasuk di negara kapitalis atau negara maju, bebas dari intervensi pemerintahnya. Yang ada ialah perbedaan kadarnya. Di beberapa negara pemerintahnya terlibat erat dalam perekonomian, sementara di negara-negara lain campur tangan pemerintah dalam perekonomiannya relatif lebih terbatas.

Dalam kaneah perekonomian modern, peranan pemerintah dapat dipilah dan ditelaah menjadi empat macam kelompok peran, yaitu :

1. Peran alokatif, yakni peranan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi.
2. Peran distributif, yakni peranan pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar.
3. Peran stabilisatif, yakni peranan pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan memulihkannya jika berada dalam keadaan *disequilibrium*.
4. Peran dinamisatif, yakni peranan pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi agar lebih cepat tumbuh, berkembang dan maju. (Dumairy, 1996).

2.3. Pembangunan Ekonomi Daerah

Konsep dasar pembangunan daerah adalah proses pengarahan, pengerahan dan pengendalian dalam upaya pemanfaatan sumberdaya daerah berdasarkan kebutuhan dan kemampuan melalui kebijakan dan strategi terpadu secara internal dan eksternal. Proses pengarahan yaitu mengindentuifikasi potensi dan merencanakan pemanfaatannya berdasarkan analisis kelayakan teknis, ekonomis dan sosial. Proses pengerahan yaitu menggerakkan lembaga-lembaga yang terlibat dalam upaya pemanfaatan sumberdaya melalui aliansi strategis (*strategic alliance*), kerjasama (*cooperative*) dan kemitraan (*partnership*). Proses

pengendalian yaitu memantau dan mengevaluasi untuk memberi umpan balik bagi penyempurnaan (Fasbir Noor Sidin, 2005).

Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana Pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dengan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi. Tolok ukur keberhasilan pembangunan dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi dan semakin kecilnya ketimpangan pendapatan antar penduduk (Mudrajad Kuncoro, 2004).

2.4. Kontribusi Sektor Infrastruktur terhadap PDB

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu komponen penting yang akan menentukan keberhasilan pembangunan suatu bangsa. Perannya sebagai penggerak sektor perekonomian akan mampu menjadi pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai multiplier dan pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan output hasil produksi sebagai input untuk konsumsi. Di samping itu, selain berperan sebagai pendorong berkembangnya sektor-sektor perekonomian, sektor infrastruktur pun memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap PDB, walaupun jika dibandingkan dengan sektor pertanian, industri tanpa migas, dan perdagangan, hotel, dan restoran.

Khusus subsektor telekomunikasi, sub sektor ini tidak mengalami penurunan *output* saat Indonesia mengalami krisis bahkan menunjukkan nilai yang terus meningkat. Contoh kongkrit yang dapat dilihat ialah bermunculannya

televisi dan operator telepon swasta yang meramaikan pertelekomunikasian di Indonesia setelah pemerintah melakukan deregulasi terhadap peran sentralnya atas subsektor telekomunikasi. Iklim inilah yang direspon oleh pihak swasta untuk berinvestasi di subsektor ini. Berdasarkan peran dan fungsinya seperti yang telah diungkapkan di atas (sebagai pendorong berkembangnya sektor-sektor terkait sebagai *multiplier* dan pada akhirnya akan menciptakan lapangan usaha baru dan memberikan *output* hasil produksi sebagai input untuk konsumsi dan mampu memberikan kontribusi terhadap PDB), maka dapat disimpulkan bahwa sektor infrastruktur merupakan fundamental perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, perlu kiranya dapat dikembalikan peran infrastruktur untuk pembangunan Indonesia.

2.5. Strategi Penentuan Prioritas Pembangunan Infrastruktur Berdasarkan Sektoral dan Kewilayahan

Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam pembangunan infrastruktur, yaitu faktor global yang dapat berdampak pada struktur perekonomian, kondisi geografis dan demografis, potensi dan prospek pembangunan infrastruktur di daerah, memperhatikan sektor-sektor yang menjadi unggulan di wilayah, dan memperhatikan aspek kemampuan pendanaan pemerintah.

Perencanaan pembangunan meliputi dua hal, yaitu pembangunan sektoral dan pembangunan wilayah. Pembangunan sektoral dititikberatkan pada sektor-sektor mana yang menjadi unggulan. Berbeda dengan pendekatan sektoral,

pendekatan regional lebih menitikberatkan pada daerah mana yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sesuai untuk dikembangkan di masing-masing daerah.

Di dalam kenyataan, pendekatan regional sering diambil tidak dalam kerangka totalitas, melainkan hanya untuk beberapa daerah tertentu, seperti daerah terbelakang, daerah perbatasan, atau daerah yang diharapkan mempunyai posisi strategis dalam arti ekonomi-politis. Karena arah yang dituju adalah gabungan antara pendekatan sektoral dan regional, maka pembangunan daerah perlu selalu dikaitkan dimensi sektoral dengan dimensi spasial.

Begitu pula dengan pembangunan infrastruktur harus mampu mengkaitkan sektor-sektor mana dari infrastruktur yang akan dikembangkan dan wilayah mana yang menjadi pembangunan dari infrastruktur tersebut. Tentunya pembangunan infrastruktur harus memperhatikan hal-hal tersebut di atas atau dengan istilah singkatnya adalah apakah pembangunan infrastruktur tersebut sangat dibutuhkan. Oleh karena itu, menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk melakukan pemetaan kebutuhan infrastruktur di daerah.

Hasil *mapping* tersebut dapat menentukan mana sektor infrastruktur yang menjadi prioritas untuk dibangun. Di samping itu, pembangunan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan daerah diharapkan dapat memberikan dampak yang luas (*multiplier effect*) terhadap sektor-sektor perekonomian lainnya.

2.6. Peranan Infrastruktur Jalan Dalam Pembangunan Ekonomi

Sebagai salah satu prasarana perhubungan dalam kehidupan bangsa, kedudukan dan peranan jaringan jalan pada hakikatnya menyangkut hajat hidup orang banyak serta mengendalikan struktur pengembangan wilayah pada tingkat nasional, terutama menyangkut perwujudan/perkembangan antar daerah yang seimbang dan pemerataan hasil-hasil pembangunan serta peningkatan pertahanan dan keamanan negara dalam rangka menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Menurut UU Nomor 13 Tahun 1980 tentang jalan, jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jalan mempunyai peranan untuk mendorong pengembangan semua satuan wilayah pembangunan dalam usaha mencapai tingkat perkembangan antar daerah yang semakin merata. Jalan merupakan kesatuan sistem jaringan jalan yang mengikat dan menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hirarki.

Menurut UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menyebutkan bahwa peranan jalan adalah (1) jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, (2) jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, (3) jalan yang

merupakan kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan mengikat wilayah Republik Indonesia.

2.7. Sistem Jaringan Jalan dan Klasifikasi Jalan

Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan lokal dan jalan lingkungan. Jalan arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Jalan kolektor adalah jalan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan lokal adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Jalan nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang

menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Jalan provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi. Jalan kabupaten adalah jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antar ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

2.8. Teori Distribusi Pendapatan

Perbedaan pendapatan timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan faktor produksi, terutama kepemilikan barang modal (*capital stock*). Pihak yang memiliki barang modal lebih banyak akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak pula dibandingkan dengan pihak yang memiliki sedikit barang modal. Perbedaan pendapatan karena perbedaan kepemilikan awal faktor produksi tersebut menurut teori neoklasik akan dapat dihilangkan atau dikurangi melalui proses penyesuaian otomatis.

Sementara pendapat lain mengatakan bahwa adanya ketidakmerataan pembagian pendapatan terjadi akibat dari ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar di sini diartikan sebagai adanya gangguan yang mengakibatkan persaingan dalam pasar tidak dapat bekerja secara sempurna. Gangguan-gangguan tersebut selain berupa perbedaan dalam kepemilikan

sumberdaya, juga dalam bentuk perbedaan dalam kepemilikan informasi dan adanya intervensi pemerintah melalui berbagai peraturannya.

Pada dasarnya distribusi pendapatan dapat dibedakan atas :

- Distribusi antar golongan pendapatan, terdiri atas distribusi absolut dan relatif. Distribusi relatif membandingkan pendapatan antar kelompok golongan pendapatan, sementara distribusi pendapatan absolut menganalisis batas pendapatan minimum yang layak diterima seseorang.
- Distribusi antar daerah.

Indikator yang digunakan untuk mengetahui kesenjangan distribusi pendapatan adalah rasio gini (*gini ratio*). Nilai gini rasio berkisar antara nol dan satu. Ide dasar perhitungan koefisien gini berasal dari upaya pengukuran luas suatu kurva yang menggambarkan distribusi pendapatan untuk seluruh kelompok pendapatan.

2.9. Distribusi Fungsional

Indikator distribusi pendapatan kedua yang lazim digunakan oleh para ekonom adalah distribusi fungsional atau distribusi pangsa pendapatan per faktor (*functional or factor share distribution of income*). Indikator ini berfokus pada bagian dari pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing faktor produksi (tanah, tenaga kerja, dan modal). Teori distribusi fungsional ini pada dasarnya mempersoalkan persentase penghasilan tenaga kerja secara keseluruhan, bukan sebagai unit-unit usaha atau faktor produksi yang terpisah secara individual, dan membandingkannya dengan persentase total pendapatan yang

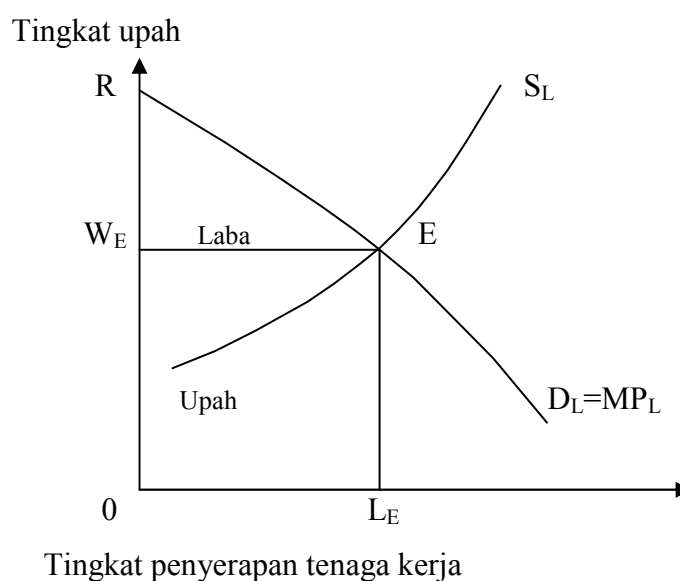
dibagikan dalam bentuk sewa, bunga dan laba (masing-masing merupakan perolehan dari tanah, uang simpanan, dan modal fisik). Walaupun individu-individu tertentu mungkin saja menerima seluruh hasil dari segenap sumber daya tersebut, tetapi hal itu berada di luar jangkauan analisis dari pendekatan fungsional.

Sudah cukup banyak kepustakaan teoritis yang dibangun atas dasar konsep distribusi pendapatan fungsional (*functional income distribution*). Masing-masing mencoba menjelaskan besar atau kecilnya pendapatan dari suatu faktor produksi dengan memperhitungkan kontribusi faktor tersebut dalam keseluruhan kegiatan produksi. Kurva permintaan dan penawaran diasumsikan sebagai sesuatu yang menentukan harga per satuan dari masing-masing faktor produksi. Apabila harga-harga unit faktor produksi tersebut dikalikan dengan kuantitas-kuantitas yang bersumber dari asumsi utilisasi (pendayagunaan) faktor produksi secara efisien (sehingga biayanya berada pada taraf minimum), maka bisa dihitung total pembayaran atau pendapatan yang diterima oleh masing-masing faktor produksi tersebut. Sebagai contoh, penawaran dan permintaan terhadap tenaga kerja akan menentukan tingkat upah. Bila upah ini dikalikan dengan seluruh tenaga kerja yang tersedia di pasar, maka akan didapat jumlah keseluruhan pembayaran upah, yang terkadang disebut dengan istilah total pengeluaran total (*total wage bill*).

Gambar grafik 2.1. merupakan ilustrasi sederhana tentang teori distribusi pendapatan fungsional. Dalam peraga tersebut, disumsikan bahwa hanya terdapat dua faktor produksi saja yaitu modal, yang persediaannya dianggap tetap atau baku, dan tenaga kerja yang merupakan satu-satunya faktor produksi variabel

(persediaan dan kuantitasnya bisa mengalami perubahan setiap saat). Berdasarkan pada asumsi pasar yang kompetitif, permintaan terhadap tenaga kerja akan ditentukan oleh produksi marginal tenaga kerja yang bersangkutan (yaitu, tambahan tenaga kerja akan terus direkrut sampai pada suatu titik dimana nilai produk marginalnya sama dengan upah riil mereka). Namun sesuai dengan prinsip pengikisan produk marginal (*diminishing marginal product*), permintaan terhadap tenaga kerja merupakan suatu fungsi yang negatif. Artinya, semakin lama jumlah tenaga kerja yang diminta akan semakin sedikit.

Gambar 2.1.
Distribusi Pendapatan Fungsional dalam Sebuah Perekonomian Pasar



Sumber : Michael P. Todaro (1997)

Kurva permintaan terhadap tenaga kerja dengan koefisien atau kemiringan negatif itu diperlihatkan oleh garis D_L pada kurva 2.1. Kemudian jika dipadukan dengan fungsi penawaran buruh tradisional dari aliran neoklasik yang punya

kemiringan positif, yakni S_L , maka akan diperoleh tingkat upah ekuilibrium sebesar W_E dan tingkat penyerapan tenaga kerja sebesar L_E . Total output nasional diwakili oleh luas bidang $O R E L_E$. Pendapatan nasional tersebut akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu $O W_E E L_E$ untuk tenaga kerja dalam bentuk upah, dan sisanya $W_E R E$ merupakan keuntungan si pemilik yang memiliki skala pengembalian tetap (*constant return to scale*). Adapun harga masing-masing faktor produksi akan ditentukan oleh kurva penawaran dan permintaan terhadap faktor yang bersangkutan, dan himpunan segenap faktor produksi itulah yang membentuk total produk nasional. Pendapatan didistribusikan menurut fungsinya, seperti buruh menerima upah, pemilik tanah menerima sewa, dan pemilik modal memperoleh laba. Ini merupakan sebuah teori yang rapi dan logis, karena setiap faktor menerima pembayaran atau pendapatan sesuai dengan kontribusi pada produk nasional, tidak lebih dan tidak kurang.

2.10. Fungsi Produksi Leontief

Teori fungsi produksi yang digunakan dalam analisis sistem neraca sosial ekonomi (SNSE) sama dengan yang dipakai dalam analisis *input-output* yaitu fungsi produksi leontief, hal ini dilakukan karena SNSE pada hakekatnya merupakan analisis lanjutan dari model *input output*.

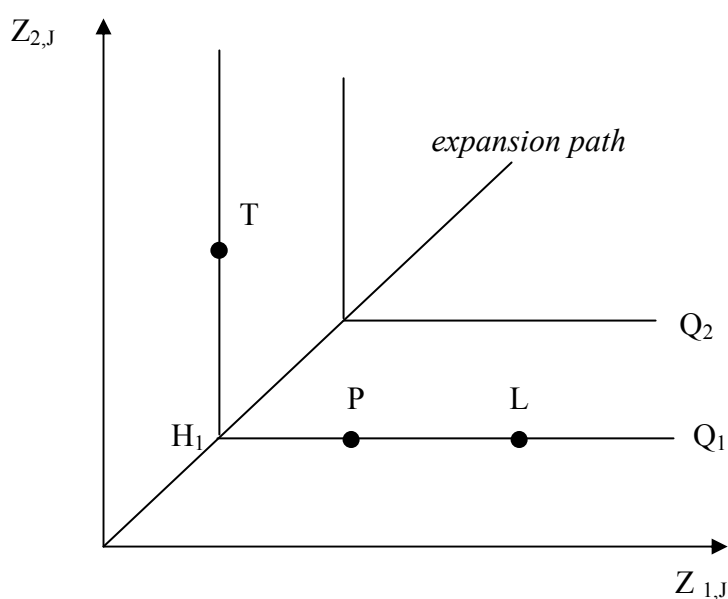
Fungsi produksi leontief memiliki sifat *constant return to scale*, yaitu bahwa dari variasi *input* ($Z_{1,j}$ dan $Z_{2,j}$) dalam jumlah tertentu akan tepat menghasilkan satu *output* tertentu pula (Q_j). Implikasinya adalah tambahan sejumlah *input* dalam proses produksi leontief tidak akan memberikan tambahan *output* apapun,

kecuali jika penambahan *input* dilakukan secara proporsional mengikuti asumsi *constant return to scale*, yaitu bila seluruh input produksi dilipatkan sebanyak n kali maka *output* juga akan berlipat sebesar n kali. Hal ini berlaku untuk setiap sektor di dalam perekonomian. (Suahazil Nazara, 2005).

Dalam fungsi produksi leontief dinyatakan bahwa proses produksi yang optimal di sepanjang *expansion path* dengan proporsi *input* yang konstan. Di sepanjang *isoquant* suatu proses produksi hanya ada 1 titik optimal produksi.

Dalam gambar 2.2. notasi Z adalah *input* primer dan Q adalah pendapatan nasional. Bentuk *isoquant* ini menggambarkan bahwa tidak ada substitusi antar faktor produksi. Atau dengan kata lain aktivitas produksi dilaksanakan dengan kuantitas faktor dalam perbandingan tetap. Faktor yang satu dapat ditambah secara tidak terbatas asal faktor kuantitas yang lain tetap, kuantitas produksi tidak berubah.

Gambar 2.2.
Grafik Fungsi Produksi Leontief



Sumber : Nazara (2005)

2.11. Sistem Neraca Sosial Ekonomi

Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) pada dasarnya adalah sebuah neraca transaksi dalam suatu perekonomian. Neraca ini digambarkan pada suatu matriks bujur sangkar partisi masukan ganda tradisional yang mencatat segala transaksi ekonomi antara pelaku ekonomi, terutama antar sektor aktivitas produksi, sektor institusi dan sektor faktor produksi.

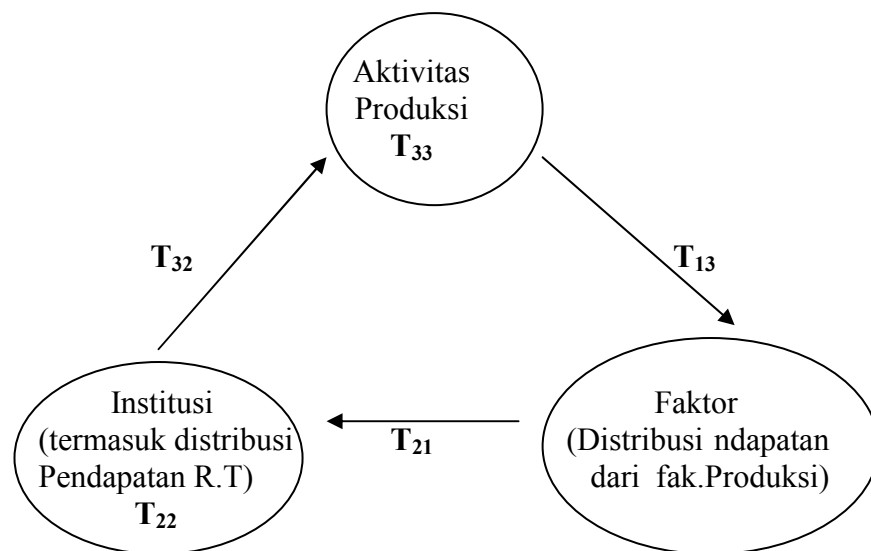
Dengan demikian, SNSE dapat dikatakan sebagai sistem informasi data yang menggambarkan struktur sosial-ekonomi di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu. Berdasarkan model dan proses pembuatannya, SNSE mempunyai kelebihan sebagai berikut :

1. SNSE merupakan suatu sistem data yang menyeluruh, konsisten dan lengkap sehingga dapat menangkap keterkaitan antar pelaku ekonomi di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.
2. SNSE mampu mengkaji pengaruh kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan kesempatan kerja, kemiskinan dan distribusi pendapatan.
3. SNSE merupakan suatu alat analisis sederhana karenanya penerapannya relatif mudah.

Menurut Thorbecke (1985) Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) dapat digunakan untuk menyusun perencanaan pembangunan, dengan cara mensimulasi perubahan neraca eksogen terhadap perubahan neraca endogen dan perubahan pola pengeluaran yang dilakukan oleh salah satu institusi baik itu rumah tangga, perusahaan maupun pemerintah. Model perencanaan pembangunan yang didasarkan pada kerangka SNSE akan memberikan saran-saran yaitu: (1)

perlakuan perubahan struktural, terutama yang berhubungan dengan perubahan dalam distribusi aset dan dalam menghasilkan distribusi pendapatan faktor dan institusi; (2) penggabungan beberapa dimensi regional; (3) pengukuran dan identifikasi distribusi pendapatan.

Gambar 2.3.
Transaksi Antar Blok dalam SNSE



Sumber: Thorbecke (1988:207)

2.12. Penelitian Terdahulu

2.12.1. Penelitian Yang Relevan Dengan Permasalahan Penelitian

Bambang Kustituantio dan Tjohar Julianto. “Pengaruh Program Pembangunan Prasarana Kota (PPKT) Terhadap Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) di Jawa Tengah”. (Jurnal Penelitian Kompak, Nomor 3 September 2001 –STIE YO, Yogyakarta).

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh (1) Pengaruh Program Pembangunan Prasarana Kota terhadap Pendapatan Daerah Sendiri, apabila tidak melibatkan investasi jalan dan air bersih. (2) Pengaruh keterlibatan investasi jalan dalam Program Pembangunan Prasarana Kota terhadap Pendapatan Daerah Sendiri dan (3) Pengaruh keterlibatan investasi air bersih dalam Program Pembangunan Prasarana Kota terhadap Pendapatan Daerah Sendiri.

Variabel yang digunakan meliputi *dummy* investasi jalan (D1), *dummy* investasi air bersih (D2) dan jalan stok kapital (LX). Alat analisis yang digunakan adalah persamaan regresi dinamis dengan menyertakan kelambagan (*lag*) satu, yang berbasis pada teori fungsi produksi Cobb-Douglas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pengaruh terhadap terlibat tidaknya investasi jalan dalam stok kapital infrastruktur Program Pembangunan Prasarana Kota, sedangkan keterlibatan investasi air bersih tidak memberi makna sama sekali pada pertumbuhan Pendapatan Daerah Sendiri. Pengaruh stok kapital terhadap Pendapatan Daerah Sendiri

baik ketika melibatkan investasi jalan maupun tidak ternyata hanya signifikan pada jangka pendek tetapi tidak pada jangka panjang. Secara umum yang menjadi penyebab tidak signifikannya hasil penelitian ini pada jangka panjang adalah dikarenakan pola anggaran pembangunan yang digunakan selama ini masih berdasarkan usulan tahunan.

2.12.2. Penelitian Yang Relevan Dengan Alat Analisis

Idham Cholid. “Dampak Pemberlakuan Tarif Pajak Progresif Terhadap Distribusi Pendapatan Di Indonesia – Simulasi SNSE Indonesia 1999” (Tesis – Program Studi Ilmu Ekonomi Pascasarjana FE UI 2003).

Penelitian ini didasarkan atas model Sistem Neraca Sosial Ekonomi Indonesia tahun 1999. Dipilihnya SNSE sebagai kerangka analisa karena SNSE mampu menggambarkan distribusi pendapatan secara luas dalam sebuah perekonomian. Selain itu SNSE juga dapat menggambarkan tingkah laku rumah tangga dalam kegiatan ekonomi. Dengan menggunakan simulasi tarif pajak terhadap semua golongan rumah tangga diharapkan dapat diketahui dampak pengenaan tarif pajak progresif terhadap distribusi *income* yang dihitung dengan indeks Gini.

Hasil perhitungan dengan menggunakan asumsi penarikan pajak 100%, didapatkan bahwa dengan menggunakan tarif yang progresif maka distribusi *income* antar kelompok rumah tangga dan sektor usaha akan lebih merata. Selain itu ditemukan bahwa sektor yang terkena dampak paling besar adalah sektor-sektor yang berkaitan dengan konsumsi rumah tangga.

2.13. Kerangka Pemikiran Teoritis

Tujuan pembangunan ekonomi daerah provinsi Jawa Tengah adalah menciptakan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi yang diikuti dengan peningkatan pendapatan masyarakat. Guna mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, peranan pemerintah provinsi Jawa Tengah dalam pengelolaan makro ekonomi daerah sangatlah dibutuhkan serta bersifat strategis. Dengan kemampuan politisnya, pemerintah provinsi Jawa Tengah dapat menempuh kebijakan fiskal yang dapat diarahkan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi regional serta mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah provinsi Jawa Tengah perlu menyusun strategi pengalokasian anggaran pembangunan daerah yang efektif dan efisien.

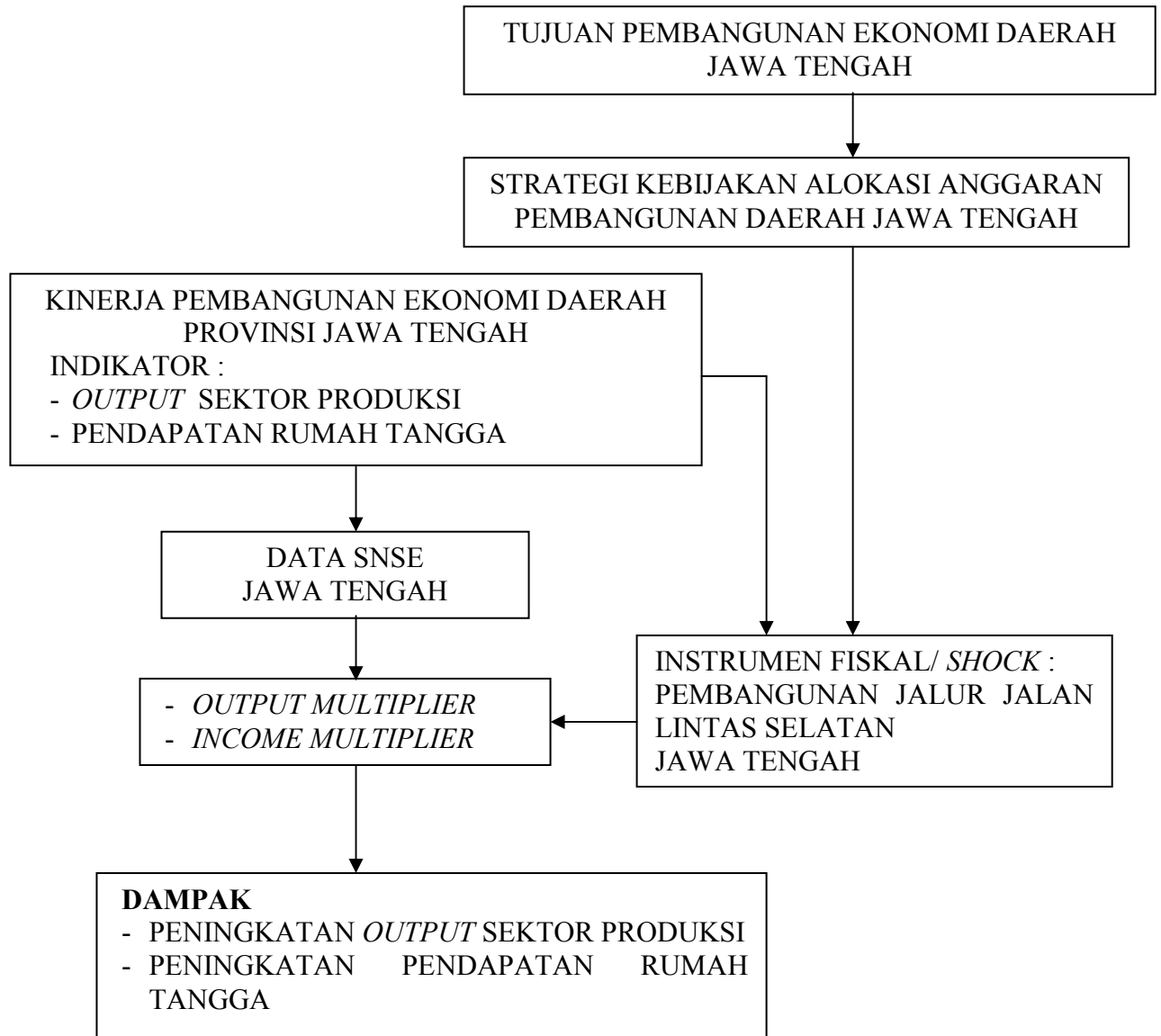
Agar pengalokasian anggaran pembangunan daerah Jawa Tengah yang diarahkan untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi regional serta mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien maka proses perencanaannya dan penyusunannya harus mempertimbangkan atas kinerja hasil-hasil pembangunan yang terjadi pada suatu periode. Indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas kinerja perekonomian Jawa Tengah adalah perkembangan nilai *output* sektor produksi Jawa Tengah serta tingkat kesenjangan pendapatan rumah tangga Jawa Tengah.

Melalui pemanfaatan Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Jawa Tengah Tahun 2004 dapat diketahui seberapa besar dampak kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Tengah atas kinerja perekonomian Jawa Tengah. Begitu juga halnya dengan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah.

Proyek ini adalah wujud nyata dari strategi pengalokasian anggaran pembangunan daerah yang diarahkan memacu pertumbuhan ekonomi daerah serta untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga Jawa Tengah.

Dengan mensimulasikan *output multiplier* dan *income multiplier* yang berasal dari hasil nilai pengganda neraca, dapat diketahui seberapa besar dampak yang diakibatkan adanya suatu peristiwa (*shock*) dari pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah. Indikator untuk melihat efektifitas dampak kebijakan tersebut adalah dengan melihat perubahan nilai *output* kegiatan sektor produksi dan perubahan distribusi pendapatan pada institusi rumah tangga. Gambaran lengkap dari mekanisme tersebut dapat dilihat di kerangka pemikiran teoritis pada gambar 2.4.

Gambar 2.4.
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.14. Hipotesis

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan dasar teori yang digunakan, rumusan hipotesis yang diajukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

H1 : Terdapat perbedaan tingkat kesenjangan pendapatan antar rumah tangga di Jawa Tengah akibat dampak pembangunan fisik Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah .

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan oleh pengumpul data primer atau oleh pihak lain yang pada umumnya disajikan dalam bentuk tabel-tabel atau diagram-diagram. Dengan demikian metode pengumpulan data sekunder, peneliti tidak meneliti langsung tetapi data didapatkan dari data yang telah dipublikasikan. (Dergibson Siagian, 2003).

Sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dan dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik yang meliputi Data Sistem Neraca Sosial Ekonomi Jawa Tengah Tahun 2004 27x27, Jawa Tengah Dalam Angka, PDRB Jawa Tengah, Rencana Strategis Provinsi Jawa Tengah 2003-2008 dan Rencana Penanganan Jalur Jalan Lintas Selatan Provinsi Jawa Tengah yang dipublikasikan Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah dan BAPPEDA Jawa Tengah.

3.2. Definisi Operasional Variabel

Dalam perangkat SNSE dibuat pembatasan variabel analisis yaitu variabel berpengaruh (eksogen) dan variabel terpengaruh (endogen). Penentuan variabel eksogen maupun endogen didasarkan pada kepentingan dan fokus penelitian. Adapun yang merupakan variabel eksogen dalam penelitian ini adalah Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah dan yang merupakan variabel endogen adalah *output* sektor produksi Jawa Tengah serta pola distribusi pendapatan rumah tangga.

Sedangkan definisi operasional dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan adalah keseluruhan alokasi biaya untuk membangun jalan arteri di wilayah selatan Jawa Tengah. Parameter variabel ini adalah rupiah.
2. *Output* adalah keseluruhan nilai rupiah yang dihasilkan dari kegiatan yang berada pada blok sektor produksi komoditi domestik Jawa Tengah. Kegiatan sektor produksi tersebut meliputi : Pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, industri makanan, Pertanian tanaman lainnya, kehutanan dan perburuan, Pertambangan, industri pengolahan kecuali makanan, listrik, gas dan air minum, Perdagangan, restoran & perhotelan, pengangkutan & komunikasi, jasa perseorangan dan RT, serta Lembaga keuangan, real estate, pemerintah, jasa sosial & kebudayaan, jasa hiburan. Parameter variabel ini adalah rupiah.

3. Pendapatan rumah tangga adalah penerimaan pendapatan dari tiap-tiap kelompok institusi rumah tangga yang dihasilkan dari balas jasa atas penggunaan faktor produksi. Misalnya upah sebagai balas jasa bagi penggunaan faktor produksi tenaga kerja, keuntungan deviden, bunga dan sewa rumah sebagai balas jasa bagi penggunaan faktor produksi kapital. Yang dimaksud rumah tangga di sini adalah Rumah Tangga Buruh Tani, Rumah Tangga Pengusaha Tani, Rumah Tangga Golongan Rendah di Pedesaan, Rumah Tangga Golongan Atas di Pedesaan, Rumah Tangga Golongan Rendah di Perkotaan, Rumah Tangga Golongan Atas di Perkotaan. Parameter variabel ini adalah rupiah.

3.3. Batasan Penelitian

Batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data yang digunakan sebagai dasar analisis untuk mengetahui dampak dari pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan terhadap *output* sektor produksi dan pendapatan rumah tangga Jawa Tengah adalah angka/nilai koefisien (angka pengganda) yang diperoleh dari hasil perhitungan atas data SNSE Jawa Tengah tahun 2004.
2. Periode data yang digunakan sebagai dasar analisis adalah tahun 2004. Dengan demikian asumsi yang digunakan dalam menganalisis struktur *output* sektor produksi, struktur pendapatan rumah tangga dan untuk menganalisis dampak pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan terhadap *output* sektor produksi dan

pendapatan rumah tangga Jawa Tengah adalah kinerja perekonomian Jawa Tengah tahun 2004.

3. Biaya pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah adalah proyeksi perhitungan kebutuhan biaya yang dikalkulasi oleh Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.

3.4. Kerangka Alur Penelitian

Kerangka alur penelitian ini terdiri atas empat tahapan :

1. Tahap pertama menganalisis data SNSE Jawa Tengah tahun 2004 27×27 , terutama yang pada blok institusi rumah tangga dan blok kegiatan sektor produksi. Nilai yang ada pada kedua blok tersebut merupakan nilai dasar (*base value*) yang nanti akan dibandingkan.
2. Tahap kedua membuat matriks pengganda (Ma) yang berasal dari data dasar matriks SNSE Jawa Tengah 27×27 .
3. Tahap ketiga melakukan simulasi tekanan (*shock*) dengan mengalikan matriks pengganda (Ma) dengan vektor yang berisi nilai biaya yang dialokasikan dalam pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah.
4. Tahap keempat menguji hipotesa, yaitu membandingkan antara nilai dasar blok institusi rumah tangga dan blok kegiatan sektor produksi dengan nilai hasil simulasi blok institusi rumah tangga dan blok kegiatan sektor produksi.

3.5. Teknik Analisa

Dalam menganalisa dampak pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan terhadap *output* dan distribusi pendapatan masyarakat Jawa Tengah, maka unit analisa yang digunakan adalah dengan memanfaatkan Matrik Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Dipilihnya SNSE sebagai alat analisis dalam penelitian ini karena SNSE merupakan model analisis dampak (*impact analysis model*) yang memperlihatkan peran dampak pengganda (*multiple effect atau multilier impact*) akibat dari suatu perubahan variabel eksogen (*exogenous variable*) terhadap variabel endogen (*endogenous variable*).

3.6. Kerangka Dasar SNSE

Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) merupakan matriks yang merangkum neraca sosial dan ekonomi secara menyeluruh. Kumpulan-kumpulan neraca (*account*) tersebut dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu kelompok neraca endogen dan kelompok neraca eksogen. Secara garis besar kelompok neraca-neraca endogen dibagi menjadi tiga blok, yaitu blok neraca produksi, blok neraca-neraca institusi dan blok neraca-neraca aktivitas produksi.

Setiap neraca dalam SNSE disusun dalam bentuk baris dan kolom. Vektor baris menunjukkan perincian penerimaan, sedangkan vektor kolom menunjukkan perincian pengeluaran. Untuk kegiatan yang sama maka jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Artinya, jumlah penerimaan sebuah sel akan sama dengan jumlah pengeluarannya.

Tabel 3.1.
Kerangka Dasar SNSE

			Pengeluaran				Jumlah	
			Neraca Endogen			Neraca Eksogen		Jumlah
			F. Produksi	Institusi	K.Produksi			
			1	2	3	4		5
Penerimaan	Neraca Endogen	Faktor .Produksi	1	0	0	T_{13} Distribusi Nilai Tambah	X_1 Pendapatan Eksogen F.Produksi	Y_1 Jumlah Pendapatan F.Produksi
		Institusi	2	T_{21} Pendapatan Institusi dari Faktor Produksi	T_{22} Transfer antar institusi	0	X_2 Pendapatan Institusi dari eksogen	Y_2 Jumlah Pendapatan Institusi
		Kegiatan .Produksi	3	0	T_{32} Permintaan Akhir Domestik	T_{33} Transaksi Antar Kegiatan (I-O)	X_3 Ekspor dan Investasi	Y_3 Jumlah Output Kegiatan Produksi
	Neraca Eksogen	4	L_1 Pengeluaran Eksogen Faktor Produksi	L_2 Tabungan	L_3 Impor dan Pajak Tak Langsung	R Transaksi antar eksogen	Jumlah Pendapatan Eksogen	
	Jumlah	5	Y'_1 Jumlah Pengeluaran Faktor Produksi	Y'_2 Jumlah Pengeluaran Institusi	Y'_3 Jumlah Pengeluaran Kegiatan Produksi	Jumlah Pengeluaran Eksogen		

Sumber: Thorbecke (1988:210), dimodifikasi

Di dalam tabel SNSE terdapat beberapa matriks. Matriks T merupakan matriks transaksi antar blok dalam neraca endogen sedangkan vektor X menunjukkan pendapatan neraca endogen dari neraca eksogen. Vektor L memperlihatkan pengeluaran neraca endogen untuk neraca eksogen, matriks ini sering disebut sebagai *leakages*. Vektor Y merupakan pendapatan total dari neraca endogen, sedangkan vektor Y' merupakan pengeluaran total dari neraca endogen.

Berdasarkan tabel SNSE di atas maka distribusi pendapatan neraca endogen dapat dijabarkan menjadi:

$$\text{Jumlah pendapatan faktor produksi} \quad Y_1 = T_{13} + X_1 \quad (3.1)$$

$$\text{Jumlah pendapatan institusi} \quad Y_2 = T_{21} + T_{22} + X_2 \quad (3.2)$$

$$\text{Jumlah pendapatan kegiatan produksi} \quad Y_3 = T_{32} + T_{33} + X_3 \quad (3.3)$$

Sedangkan untuk distribusi pengeluaran neraca endogen dapat dirinci menjadi :

$$\text{Jumlah pengeluaran faktor produksi} \quad Y_1' = T_{21} + L_1 \quad (3.4)$$

$$\text{Jumlah pengeluaran institusi} \quad Y_2' = T_{22} + T_{32} + L_2 \quad (3.5)$$

$$\text{Jumlah pengeluaran kegiatan produksi} \quad Y_3' = T_{13} + T_{33} + L_3 \quad (3.6)$$

Matriks T sebagai matriks transaksi antar blok di dalam neraca endogen dapat ditulis sebagai berikut:

$$T = \begin{pmatrix} 0 & 0 & T_{13} \\ T_{21} & T_{22} & 0 \\ 0 & T_{32} & T_{33} \end{pmatrix} \quad (3.7)$$

Sebagai salah satu sub matriks pada SNSE, matriks T juga dapat menggambarkan transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam skala yang lebih kecil, yaitu di dalam neraca endogen.

Jika kita perhatikan berdasarkan baris dalam SNSE, maka matriks T pada persamaan (3.7) menunjukkan penerimaan salah satu blok dari blok yang lainnya. Pada baris pertama, T_{13} memperlihatkan penerimaan faktor produksi dari kegiatan produksi. Selanjutnya pada baris kedua, T_{21} menggambarkan penerimaan

institusi dari faktor produksi dan T_{22} menunjukkan penerimaan institusi dari institusi itu sendiri. Baris terakhir pada matriks T terdiri dari T_{32} yang memperlihatkan penerimaan kegiatan produksi dari institusi dan T_{33} menggambarkan penerimaan kegiatan produksi dari kegiatan produksi itu sendiri.

Sedangkan apabila dibaca menurut kolom, matriks T menunjukkan pengeluaran salah satu blok untuk yang lainnya. Pada kolom pertama, T_{21} menggambarkan pengeluaran faktor produksi untuk institusi. Pada kolom kedua, T_{22} merefleksikan pengeluaran institusi terhadap institusi itu sendiri dan T_{32} menunjukkan pengeluaran institusi untuk kegiatan produksi. Pada kolom ketiga, T_{13} memperlihatkan pengeluaran kegiatan produksi untuk faktor produksi dan T_{33} menunjukkan kegiatan produksi terhadap kegiatan produksi itu sendiri.

3.6.1. Model Pengganda Neraca

Matriks transaksi T menunjukkan aliran penerimaan dan pengeluaran yang dinyatakan dalam satuan moneter. Apabila setiap sel dalam matriks T dibagi dengan jumlah kolomnya, maka akan didapatkan sebuah matriks baru yang menunjukkan besarnya kecenderungan pengeluaran rata-rata (*Average expenditure propensities*) yang dinyatakan dalam proporsi (perbandingan). Matriks baru tersebut, katakanlah matriks A , unsur-unsurnya adalah A_{ij} yang merupakan hasil pembagian nilai T pada baris ke- i dan kolom ke- j (T_{ij}) oleh jumlah kolom ke- j atau dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$a_{ij} = T_{ij} \square_j^{-1} \quad (3.8)$$

Dalam persamaan diatas, \square_j adalah matriks diagonal dari nilai-nilai jumlah kolom, sehingga:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & 0 \\ 0 & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \quad (3.9)$$

Karena

$$Y = AY + X \quad \text{atau} \quad (3.10)$$

$$Y = (1-A)^{-1} X \quad (3.11)$$

Jika $(1-A)^{-1} = Ma$, maka

$$Y = Ma X \quad (3.12)$$

Dalam hal ini, A berisi koefisien-koefisien yang menunjukkan pengaruh langsung dari perubahan yang terjadi pada sebuah sektor terhadap sektor yang lain. Sedangkan Ma yang dinamakan pengganda neraca (*accounting multiplier*) merupakan pengganda yang memperlihatkan pengaruh pada sebuah sektor terhadap sektor lainnya setelah melalui keseluruhan SNSE.

3.6.2. Dekomposisi Pengganda

Pengganda neraca (Ma) dapat diuraikan menjadi pengganda transfer (Ma_1), pengganda *open loop* (Ma_2) dan pengganda *closed loop* (Ma_3). Pyatt and Round (1988) pernah melakukan dekomposisi terhadap pengganda neraca yang hasilnya sebagai berikut:

$$Ma = Ma_3 Ma_2 Ma_1 \quad (3.13)$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa sebenarnya pengaruh global dari suatu sektor terhadap sektor lain tidak berlangsung begitu saja melalui pengganda Ma, melainkan terjadi dalam tiga tahapan Ma_1 , Ma_2 dan Ma_3 .

3.6.3. Pengganda Transfer

Ma_1 adalah pengganda transfer yang menunjukkan pengaruh dari satu blok pada dirinya sendiri.

$$Ma_1 = (I-A^0)^{-1} \quad (3.14)$$

A^0 adalah matriks diagonal dari matriks A

$$A^0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & a_{22} & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix} \quad (3.15)$$

sehingga dalam bentuk matriks:

$$Ma_1 = \begin{pmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & (I-A_{22})^{-1} & 0 \\ 0 & 0 & (I-A_{33})^{-1} \end{pmatrix} \quad (3.16)$$

Melalui pengganda transfer (Ma_1) ini, dapat diketahui pengaruh injeksi pada sebuah sektor terhadap sektor lain dalam satu blok, sehingga melalui keseluruhan sistem dalam blok tersebut, sebelum berpengaruh terhadap blok yang lain. Dalam memahami Ma_1 seolah-olah ada asumsi bahwa injeksi pada satu sektor hanya berpengaruh terhadap sektor-sektor lain dalam satu blok yang sama dan tidak terhadap sektor-sektor yang berada pada blok yang lain. Oleh karena itu, Ma_1 disebut sebagai pengganda transfer.

Dalam matriks Ma_1 pada persamaan (3.16) dapat dilihat besarnya pengganda pada masing-masing blok. Pada blok kegiatan produksi misalnya, besarnya pengganda transfer adalah $(I-A_{33})^{-1}$. Hal ini berarti bahwa setiap dilakukan injeksi pada salah satu sektor produksi akan berpengaruh pada sektor produksi yang lainnya sebesar injeksi tersebut dikalikan dengan $(I-A_{33})^{-1}$. Dalam model Input-Output $(I-A_{33})^{-1}$ adalah matriks Invers Leontief.

Pada blok institusi, besarnya pengganda transfer adalah $(I-A_{22})^{-1}$, ini berarti setiap injeksi pada salah satu institusi akan berpengaruh pada institusi yang lainnya sebesar injeksi tersebut dikalikan dengan $(I-A_{22})^{-1}$.

Pada blok faktor produksi, besarnya pengganda transfer adalah I. Ini berarti bahwa injeksi pada salah satu faktor produksi hanya akan memberikan pengaruh pada faktor produksi yang diinjeksi tersebut, tidak terhadap faktor produksi yang lain.

3.6.4. Pengganda *Open Loop*

Ma_2 adalah pengganda *open loop* atau *cross-effect*, yang merupakan pengaruh dari satu blok ke blok lain. Injeksi pada salah satu sektor dalam sebuah blok tertentu akan berpengaruh terhadap sektor lain di blok yang lain setelah melalui keseluruhan sistem dalam blok lain tersebut.

$$Ma_2 = (I + A^* + A^{*2}) \quad (3.17)$$

Di mana $A^* = (I-A^0)^{-1} (A-A^0)Y$

Sehingga A^* merupakan sebuah matriks dengan

$$A^*_{13} = A_{13} \quad (3.18)$$

$$A^*_{21} = (I-A_{22})^{-1} A_{21} \quad (3.19)$$

$$A_{32}^* = (I - A_{33})^{-1} A_{32} \quad (3.20)$$

Sedangkan sel yang lain berisi angka (matriks) nol.

$$A^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & A_{13}^* \\ A_{21}^* & 0 & 0 \\ 0 & A_{32}^* & 0 \end{pmatrix} \quad (3.21)$$

Dengan demikian maka pengganda open loop menjadi;

$$Ma_2 = \begin{pmatrix} I & A_{13}^* A_{32}^* & A_{13}^* \\ A_{21}^* & I & A_{21}^* A_{13}^* \\ A_{32}^* A_{21}^* & A_{32}^* & I \end{pmatrix} \quad (3.22)$$

Untuk memahami pengertian pengganda *open loop*, maka perlu diingat bahwa pengaruh satu blok pada SNSE dapat terjadi tanpa perantara ataupun dengan perantara. Pada gambar 3.1. diperlihatkan bahwa aliran pendapatan terjadi dari blok kegiatan produksi ke blok faktor produksi dan selanjutnya menuju blok institusi. Dari blok institusi, aliran pendapatan bergerak menuju blok kegiatan produksi.

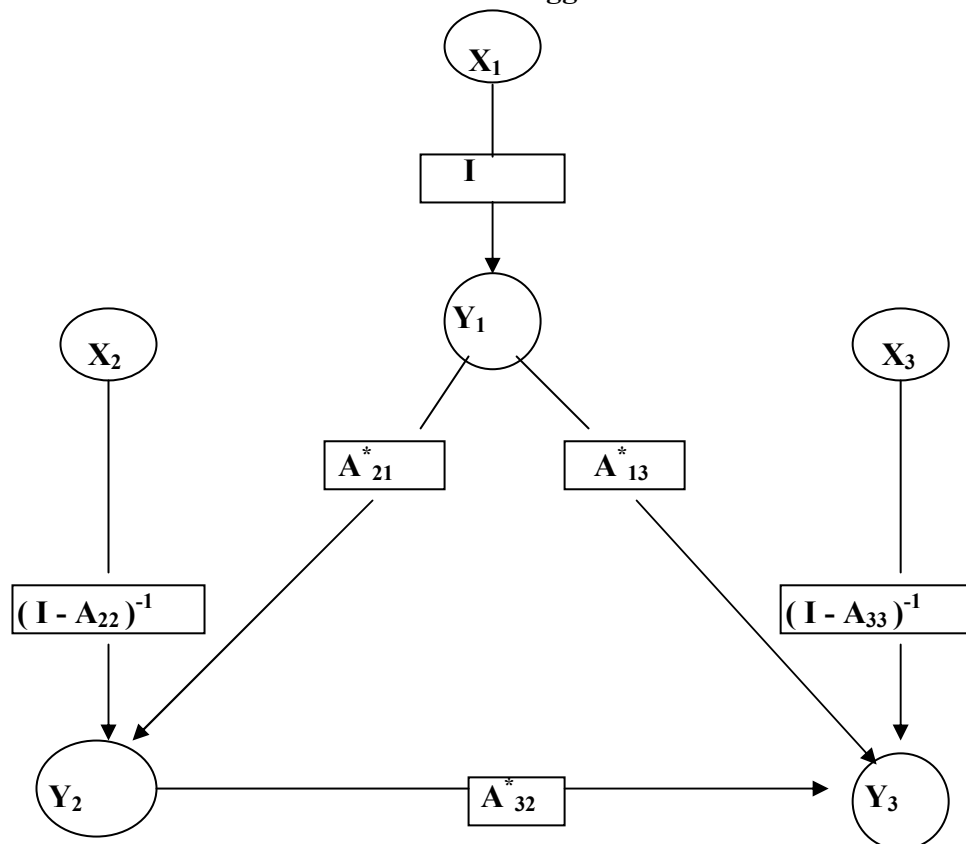
Kenaikan pendapatan pada blok kegiatan produksi misalkan dilakukan injeksi pada salah satu faktor produksi akan berpengaruh terhadap pendapatan blok faktor produksi dengan pengganda sebesar A_{13}^* dan matriks Ma_2 .

Baris ke-1 kolom ke-3. Kenaikan pendapatan pada blok faktor produksi (Y_1) berpengaruh terhadap pendapatan blok institusi (Y_2) dengan pengganda sebesar A_{21}^* yang dalam matriks Ma_2 terletak pada baris ke-2 kolom ke-1.

Kenaikan pendapatan pada blok institusi (Y_2) berpengaruh terhadap pendapatan blok kegiatan produksi (Y_3) dengan pengganda sebesar A^*_{32} yang dalam matriks Ma_2 terletak pada baris ke-3 kolom ke-2.

Sementara itu, pengaruh Y_1 terhadap Y_3 terjadi melalui perantara Y_2 dengan pengganda sebesar $A^*_{32}A^*_{21}$ yang pada matriks Ma_2 terletak pada baris ke-3 kolom ke-1. Pengaruh Y_2 terhadap Y_1 terjadi melalui perantara Y_3 , dengan pengganda sebesar $A^*_{13}A^*_{32}$, yang pada matriks Ma_2 terletak pada baris ke-1 kolom ke-2. Pengaruh Y_3 terhadap Y_2 terjadi melalui perantara Y_1 , dengan pengganda sebesar $A^*_{21}A^*_{13}$ yang pada matriks Ma_2 terletak pada baris ke-2 kolom ke-3.

Gambar 3.1.
Struktur Pengganda



Sumber: Pyatt and Round; 1988

3.6.5. Pengganda *Closed Loop*

Pengganda *closed loop* (Ma_3) dapat menggambarkan pengaruh suatu blok ke blok yang lain dan kemudian kembali pada blok semula.

$$Ma_3 = (I - A^*_3)^{-1} \quad (3.23)$$

Ma_3 merupakan matriks yang diagonal utamanya secara berurutan dari kiri atas ke kanan bawah berisikan sel-sel $(I - A^*_{13}A^*_{32}A^*_{21})^{-1}$, $(I - A^*_{21}A^*_{13}A^*_{32})^{-1}$ dan $(I - A^*_{32}A^*_{21}A^*_{13})^{-1}$.

Injeksi pada salah satu faktor produksi akan berpengaruh pada sektor-sektor lain pada blok institusi, kemudian berpengaruh pada blok kegiatan produksi dan akhirnya kembali pada sektor-sektor dalam blok faktor produksi. Satu putaran dari blok faktor produksi kembali ke blok faktor produksi inilah yang disebut pengaruh *closed loop* faktor produksi dengan pengganda sebesar $(I - A^*_{13}A^*_{32}A^*_{21})^{-1}$.

Demikian pula dengan blok institusi dan kegiatan produksi. Injeksi pada salah satu sektor dalam blok institusi pada akhirnya akan berpengaruh *closed loop* pada sektor-sektor dalam blok institusi itu sendiri, setelah berpengaruh pada blok kegiatan produksi dan faktor produksi, dengan pengganda sebesar $(I - A^*_{21}A^*_{13}A^*_{32})^{-1}$. Sedangkan pengganda *closed loop* untuk blok kegiatan produksi adalah sebesar $(I - A^*_{32}A^*_{21}A^*_{13})^{-1}$.

3.7. Metode Simulasi

Simulasi pada penelitian ini dilakukan untuk (1) melihat dampak dari pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah terhadap *output* perekonomian dan pendapatan rumah tangga Jawa Tengah. (2) untuk melakukan pengujian hipotesis.

Adapun metode simulasi yang dilakukan adalah mengalikan matriks pengganda (M_a) dengan vektor yang merupakan vektor eksogen. Vektor eksogen di sini adalah nilai biaya yang dialokasikan dalam rencana pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah. Hasil dari simulasi ini kemudian dibandingkan terhadap nilai dasarnya (*base value*) dari blok SNSE yang dianalisis.

3.8. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis menggunakan test statistik uji beda. Adapun data yang digunakan dalam analisa statistik adalah nilai *proporsi share* pendapatan dari masing-masing rumah tangga yaitu nilai rasio/koeffisien antara pendapatan tiap-tiap kelompok rumah tangga terhadap pendapatan total sektor/institusi rumah tangga.

Test statisitik yang digunakan dalam analisis ini adalah Uji Z

$$Z_h = \frac{\bar{d} - 0}{S_d}$$

Di mana :

Z_h = Nilai Z hitung

\bar{d} = Nilai rata-rata perbedaan hasil sebelum dan sesudah ada injeksi

S_d = Standard Deviasi

Model Pengujian

$H_0 = \mu_1 = \mu_2$ artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan

$H_1 = \mu_1 \neq \mu_2$ artinya terdapat perbedaan yang signifikan

Bila $\alpha = 5\%$ maka nilai kritis Z adalah + 1,65

H_0 diterima apabila $Z_h < 1,65$

H_0 ditolak apabila $Z_h > 1,65$

BAB IV

GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN

4.1. Latar Belakang Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah

Pada kepentingan skala nasional pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah (JJLS) merupakan bagian rencana strategis untuk mengembangkan potensi wilayah selatan pulau Jawa. Sedangkan bagi pemerintah provinsi Jawa Tengah, JJLS dimaksudkan (1) untuk mendorong perkembangan wilayah selatan Jawa Tengah yang kenyataannya lebih tertinggal dibandingkan dengan wilayah tengah atau utara Jawa Tengah, (2) untuk mengembangkan potensi daerah wilayah selatan secara optimal, (3) untuk menyediakan infrastruktur aksesibilitas wilayah yang memadai guna menghubungkan daerah satu dengan daerah yang lain. (Dinas Bina Marga Jawa Tengah : 2006).

Penegasan latar belakang pembangunan JJLS juga telah dinyatakan secara terbuka oleh Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto. Menurut Gubernur pembangunan JJLS ini untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah selatan dengan pantai utara Jawa Tengah. Apabila proyek ini selesai, diharapkan perkembangan perekonomian masyarakat di kawasan pantai selatan Jawa Tengah meningkat dan mengurangi beban kepadatan lalu lintas di jalur pantai utara. (Kompas : 30 Mei 2007).

Manfaat yang diharapkan dari pembangunan JJLS ini adalah (1) untuk mengembangkan wilayah selatan Jawa Tengah yang masih terisolir, (2) untuk meningkatkan aksesibilitas antara wilayah utara dan tengah dengan wilayah selatan, (3) untuk menggali sumber-sumber daya alam sehingga dapat mendorong peningkatan lapangan kerja, (4) untuk mendorong peningkatan perekonomian wilayah selatan Jawa Tengah. (Dinas Bina Marga Jawa Tengah : 2006).

4.2. Aspek Legal Formal Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah

Guna memperkuat dan melengkapi aspek kelembagaan serta untuk mendapat dukungan secara luas dari seluruh lapisan masyarakat Jawa Tengah terhadap rencana pembangunan JJLS maka diperlukan adanya landasan yuridis sebagai legitimasi kebijakan. Adapun legal formal yang menjadi dasar pembangunan JJLS adalah sebagai berikut :

1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 620-306 tanggal 4 Nopember 1998 Tentang Penetapan Status Ruas-Ruas Jalan Sebagai Jalan Propinsi.
2. Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 376/ KPS/ M/2004 tanggal 19 Oktober 2004 Tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional.
3. Kep. Gubernur Jawa Tengah Nomor : 620/08/2000 tanggal 24 Agustus 2000 Tentang Penetapan Jalan-Jalan Kabupaten/Kota.

4. Rapat Koordinasi Terbatas Perencanaan Pembangunan antara Badan Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Timur dengan Badan Pembangunan Daerah Propinsi Jawa Tengah pada tanggal 16 Februari 2004 di Yogyakarta perihal rencana kegiatan bersama antara Pemerintah Jawa Timur dengan Pemerintah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004-2005.
5. Kesepakatan Bersama Gubernur Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D I Y dan Jawa Timur No. 611.51/2 – HUK/2004; No.620/24/Desember/2004 ; No. 1 Tahun 2004 ; No.119/0450 ; No.120.1/522/012/2004 tanggal 18 Februari 2004 Tentang Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa.
6. Rapat Koordinasi Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa di Surakarta tanggal 22-23 Desember 2004, yang menghasilkan Kesepakatan Bersama mengenai status jalan, fungsi jalan dan titik temu masing-masing perbatasan antar propinsi yang dilewati Jaringan Jalan Lintas Selatan.
7. Rapat Kerja/Dengar Pendapat Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tanggal 2 Juni 2004 di Jakarta.
8. Rakor Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa di Bandung pada tanggal 29-30 Maret 2005, yang menghasilkan Rancangan Keputusan Bersama Gubernur Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D I Y, dan Jawa Timur.

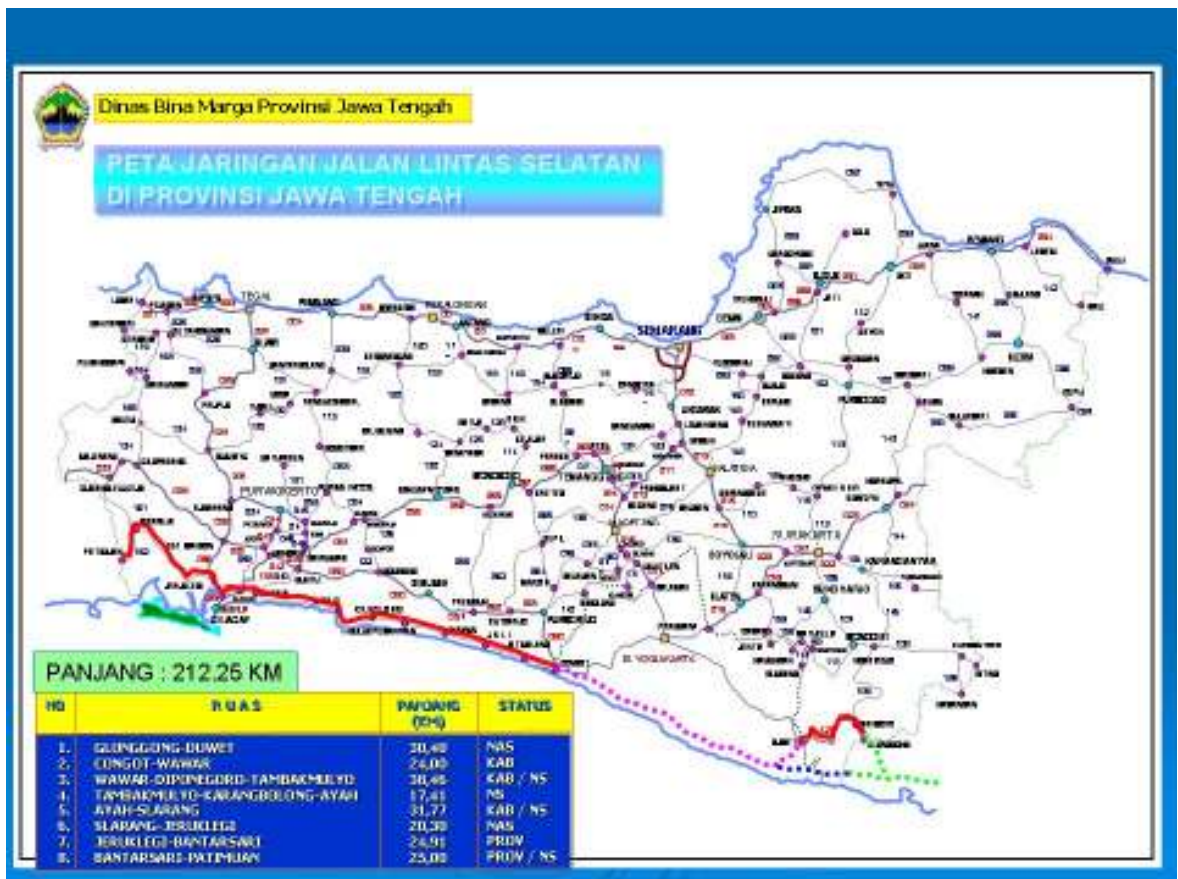
9. Rakor Pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan di Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 26 April 2005 di Magelang yang menghasilkan Rancangan Keputusan Bersama Gubernur Jawa Tengah, Bupati Cilacap, Bupati Kebumen, Bupati Purworejo dan Bupati Wonogiri.
10. *Detail Engineering Design* dan AMDAL Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah.
11. Kep.Men.PU Nomor : 369/KPTS/M/2005 tanggal 18 April 2005 Tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional serta Lampirannya : II.13 A yang mencantumkan peta Jaringan Jalan Lintas Selatan sebagai Rencana Jalan Strategis Nasional.
12. Kep.Men.PU Nomor: 280/KPTS/M/2006 Tentang Perubahan Kep.Men.PU Nomor: 369/KPTS/M/2005 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional tanggal 24 Juli 2006

4.3. Rute Lintasan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah.

Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah berada atau melintasi di empat kabupaten Jawa Tengah, kabupaten tersebut meliputi Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri. Panjang jalan JJLS sendiri adalah sepanjang 212,25 Km di mana dari volume tersebut 101,96 Km di antaranya berada di Kabupaten Cilacap, 55,87 Km berada di Kabupaten Kebumen, 24 Km berada di Kabupaten Purworejo dan 30,40 Km berada di Kabupaten Wonogiri.

JJLS di wilayah kabupaten Cilacap melewati wilayah Patimuan – Tambakreja – Cismur – Bantarsari – Kawunganten – Jeruklegi – Gumilir – Slarang – Adiraja – Jetis. JJLS di Kabumen melewati wilayah Pantai Ayah – Karangbolong – Tambakmulyo – Mawar. JJLS di Kabupaten Purworejo melewati wilayah Mawar – Jali – Congot. JJLS di Kabupaten Wonogiri melewati wilayah Duwet – Giriwoyo – Glonggong.

Gambar 4.1.
Peta Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah



4.4. Pembiayaan Pembangunan Jalur Lintas Selatan Jawa Tengah

Kebutuhan dana untuk pembiayaan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah diperkirakan mencapai hampir 1,5 triliun rupiah. Rincian besarnya pembiayaan dapat di lihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel. 4.1. Panjang Jalan dan Biaya JJLS Menurut Kabupaten

No.	Kabupaten	Panjang Km	Biaya (Rp)
1	Cilacap	101.98	676,736,814,458
2	Kebumen	55.87	492,330,291,100
3	Purworejo	24.00	165,085,991,000
4	Wonogiri	30.40	154,442,248,000
Total		212.25	1,488,595,344,558

Sumber : Bina Marga Jawa Tengah

Apabila melihat dari perhitungan tersebut maka untuk membangun 1 meter jalan JJLS dibutuhkan sekitar 7 juta rupiah.

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Keluaran (*Output*) Kegiatan Sektor Produksi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004

Keluaran atau *output* kegiatan sektor produksi komoditi Provinsi Jawa Tengah menurut Sistem Neraca Sosial Ekonomi dikelompok atas lima kelompok yang terdiri dari sektor : Pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, industri makanan; Pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, industri makanan; Pertambangan, industri pengolahan kecuali makanan, listrik, gas dan air minum; Perdagangan, restoran & perhotelan, pengangkutan & komunikasi, jasa perseorangan dan rumah tangga; Lembaga keuangan, real estate, pemerintah, jasa sosial & kebudayaan, jasa hiburan.

Tabel : 5.1. *Output* Kegiatan Sektor Produksi Komoditi Domestik Jawa Tengah Tahun 2004
(juta)

Sektor Produksi	Nilai (Rp)	%
Pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, industri makanan	133.425.960,58	30,14
Pertanian tanaman lainnya, kehutanan dan perburuan	6.102.050,24	1,37
Pertambangan, industri pengolahan kecuali makanan, listrik, gas dan air minum	179.509.438,66	40,55
Perdagangan, restoran & perhotelan, pengangkutan & komunikasi, jasa perseorangan dan rumah tangga	86.185.051,51	19,47
Lembaga keuangan, real estate, pemerintah, jasa sosial & kebudayaan, jasa hiburan	37.404.089,03	8,45
Jumlah	442.626.590,02	100

Sumber : SNSE Jawa Tengah 2004, BPS Jawa Tengah

Berdasarkan data tahun 2004, *output* keseluruhan kegiatan sektor produksi komoditi domestik Provinsi Jawa Tengah senilai Rp. 442.63 trilliun. Dari kelima sektor produksi tersebut, sektor produksi yang menghasilkan *output* paling besar

adalah sektor produksi pertambangan, industri pengolahan kecuali makanan, listrik, gas dan air minum yaitu sebesar Rp. 179,5 triliun atau mencapai 40% dari keseluruhan *output* sektor produksi di Jawa Tengah. Kedua adalah *output* kegiatan sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, industri makanan di mana nilai *outputnya* adalah sebesar Rp.133,43 triliun atau sebesar 30,1% dari keseluruhan *output* sektor produksi di Jawa Tengah.

Apabila melihat dari nilai *output* tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa, meskipun sektor sekunder (pertambangan, industri pengolahan kecuali makanan, listrik, gas dan air minum) merupakan penyumbang *output* terbesar tetapi hal ini bukan berarti struktur perekonomian Jawa Tengah memiliki ciri itu bersifat non agraris. Masih tingginya nilai *output* dari kegiatan sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, industri makanan menunjukkan bahwa sektor primer masih merupakan sektor penentu dinamika perekonomian Jawa Tengah.

5.2. Pendapatan Rumah Tangga Jawa Tengah Tahun 2004

Pendapatan/penerimaan rumah tangga dalam penelitian ini mengacu pada fungsi ekonominya berasal dari tiga sumber utama, yaitu a) upah dan gaji, b) pendapatan kapital, c) penerimaan transfer. Penerimaan rumah tangga tersebut setelah dikurangi dengan pengeluaran untuk pajak ditambah dengan transfer (*netto*), sisanya disebut sebagai pendapatan yang siap dibelanjakan (*disposable income*). Pada akhirnya pendapatan *disposable* ini akan digunakan oleh rumah tangga untuk membiayai seluruh konsumsi akhirnya dan sisa penerimaannya disebut sebagai tabungan (penerimaan dikurangi dengan pengeluaran konsumsi).

Untuk melihat variasi distribusi atau kesenjangan pendapatan rumah tangga di Jawa Tengah maka golongan rumah tangga dibuat ke dalam enam kelompok yaitu:

- Rumah tangga buruh tani
- Rumah tangga pengusaha tani
- Rumah tangga golongan rendah di pedesaan
- Rumah tangga golongan atas pedesaan
- Rumah tangga golongan rendah di perkotaan
- Rumah tangga golongan atas perkotaan

Tabel 5.2.
Total Pendapatan dan Pengeluaran menurut Golongan
Rumah Tangga Propinsi Jawa Tengah, 2004
(Miliar Rupiah)

	Jumlah	Pertanian		Bukan Pertanian			
		Buruh Tani	Pengusaha	Pedesaan		Perkotaan	
				Rumah Tangga gol. rendah	Rumah Tangga gol. atas	Rumah Tangga gol. rendah	Rumah Tangga gol. atas
Jumlah Penduduk (jiwa)	32.770.900	4.925.363	9.321.373	6.544.169	2.341.337	6.537.914	3.100.744
Jumlah Rumah Tangga (RT)	8.352.400	1.213.412	2.344.645	1.677.559	608.361	1.692.401	816.022
1. Upah dan gaji	117.487,59	9.685,14	33.312,25	13.384,95	13.134,88	20.428,39	27.541,97
2. Pendapatan Kapital	18.896,10	766,63	5.907,29	1.004,21	2.221,63	2.132,11	6.864,23
3. Penerimaan Transfer dari :							
- RT	10.106,33	3.759,00	1.391,94	3.148,75	137,59	1.486,63	182,41
- Perusahaan	1.577,09	83,38	354,59	147,24	156,47	332,73	502,68
- Pemerintah	6.591,54	1.467,67	1.454,27	1.655,92	229,26	1.585,36	199,06
- Luar Negeri	2.095,44	363,05	292,24	558,05	319,07	319,69	243,34
4. Jumlah Pendapatan	156.754,09	16.124,86	42.712,58	19.899,13	16.198,91	26.284,92	35.533,69
5. Pembayaran pajak langsung	2.118,99	100,92	558,90	123,75	249,98	253,50	831,93
6. Pendapatan RT setelah pajak	154.635,10	16.023,94	42.153,69	19.775,37	15.948,92	26.031,42	34.701,76
7. Pembayaran transfer ke :							
- RT	10.106,33	364,15	3.441,03	1.276,75	1.134,56	1.657,99	2.231,85
- Luar Negeri	810,63	13,72	62,92	105,57	146,82	199,15	282,45
8. Pendapatan Disposable	143.718,14	15.646,06	38.694,74	18.393,05	14.667,54	24.174,28	32.187,46
9. Pengeluaran konsumsi	126.826,49	14.694,49	36.469,78	17.328,39	12.321,66	21.518,63	24.493,54
10. Tabungan	16.891,65	951,57	2.179,96	1.064,66	2.345,88	2.655,65	7.693,92

Sumber : Sistem Neraca Sosial Ekonomi Jawa Tengah 2004, BPS Jateng.

Pada tabel 5.2. dapat dilihat bahwa total pendapatan yang diperoleh seluruh rumah tangga di Jawa Tengah yang pada tahun 2004 berjumlah 8.352.400 rumah tangga adalah sebesar 156,75 triliun rupiah. Artinya secara rata-rata pendapatan rumah tangga selama setahun tersebut adalah sebesar 18,77 juta rupiah per rumah tangga atau 4,78 juta rupiah perkapita.

Rata-rata interval pendapatan rumah tangga Jawa Tengah menurut golongan rumah tangga selama setahun berkisar antara 11,86 juta rupiah (terendah) hingga yang tertinggi 43,55 juta rupiah per rumah tangga. Sedangkan pendapatan perkapitanya antara 3,04 juta rupiah hingga 11,46 juta rupiah setahun. Rata-rata pendapatan terbesar diperoleh rumah tangga golongan atas baik di perkotaan maupun dipedesaan yaitu sebesar 43,55 juta rupiah per rumah tangga atau 11,46 juta rupiah per kapita (perkotaan) dan 26,63 juta rupiah per rumah tangga atau 6,92 juta rupiah per kapita (pedesaan). Golongan rumah tangga lainnya mempunyai rata-rata pendapatan antara 11-18 juta rupiah per rumah tangga atau 3 - 4,8 juta rupiah perkapita setahun.

5.3. Analisis Data dan Pembahasan

5.3.1. Analisis Tekanan Global Sektor Produksi Jawa Tengah

Untuk mengetahui mengapa (1) sektor pertambangan, industri pengolahan kecuali makanan, listrik, gas dan air minum dan (2) sektor pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, industri makanan begitu dominan dalam struktur *output* sektor produksi di Jawa Tengah, dapat diamati dengan menggunakan analisis tekanan global. Yaitu mengamati angka tekanan global yang diberikan

oleh blok faktor produksi, blok institusi secara keseluruhan (rumah tangga, perusahaan dan pemerintah), dan blok sektor produksi terhadap kegiatan sektor produksi Jawa Tengah melalui matriks Ma (*Multiplier Accounting*).

Tabel 5.3.
Angka Pengganda Global
Yang Diterima Sektor Produksi di Jawa Tengah 2004

No SNSE	Sektor Produksi	Multiplier		
		Faktor Produksi	Institusi	Sektor Produksi
19	Pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, industri makanan.	8,9668	7,1299	4,7143
20	Pertanian tanaman lainnya, kehutanan dan perburuan.	0,4603	0,3588	1,2354
21	Pertambangan, industri pengolahan kecuali makanan, listrik, gas dan air minum.	5,9135	4,6639	3,9542
22	Perdagangan, restoran & perhotelan, pengangkutan & komunikasi, jasa perseorangan & RT.	4,0805	3,2733	3,3249
23	Lembaga keuangan, real estate, pemerintah, jasa sosial & kebudayaan, jasa hiburan.	2,8950	2,5537	2,5723
	Rata-rata	4,4632	3,5959	3,1602

Sumber : Tabel SNSE Jawa Tengah Tahun 2004 (diolah)

Dari tabel 5.3. menunjukkan bahwa angka pengganda global terbesar baik karena injeksi dari faktor produksi, dari institusi maupun dari sektor produksi berada di sektor produksi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, industri makanan, sedangkan yang paling rendah berada pada sektor produksi pertanian tanaman lainnya, kehutanan dan perburuan.

Besarnya angka pengganda global yang dimiliki sektor produksi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, industri makanan memiliki arti bahwa apabila terdapat injeksi dari aktivitas eksogen yang diarahkan kepada blok sektor produksi maka akan memberikan tekanan *output* yang paling besar pada sektor produksi pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, industri makanan.

Sementara tekanan langsung kegiatan ekonomi terhadap sektor produksi paling besar berasal dari blok faktor produksi dengan angka pengganda rata-rata sebesar 4,4632. kemudian dari blok institusi yakni sebesar 3,5959 dan selanjutnya dari blok sektor produksi itu sendiri yakni sebesar 3,1602. Dengan demikian apabila terdapat peningkatan pengeluaran dari blok faktor produksi sebesar Rp. 1 milyar maka akan berdampak pada kenaikan *output* rata-rata pada sektor produksi Jawa Tengah sebesar Rp. 4,46 milyar

5.3.2. Analisis Tekanan Global Pendapatan Rumah Tangga Jawa Tengah

Untuk mengetahui bagaimana pola distribusi pendapatan rumah tangga di Jawa Tengah, dapat diamati dengan menggunakan analisis tekanan global. Dari tabel 5.4. menunjukkan bahwa angka pengganda global terbesar dari pendapatan rumah tangga di Jawa Tengah baik yang dikarenakan injeksi dari faktor produksi, institusi maupun sektor produksi berada pada kelompok rumah tangga pengusaha tani. Sedangkan efek *multiplier* yang paling rendah dimiliki rumah tangga buruh tani.

Besarnya angka pengganda global yang dimiliki oleh kelompok rumah tangga pengusaha tani memiliki arti bahwa apabila terdapat injeksi dari aktivitas eksogen yang diarahkan kepada blok institusi maka akan memberikan tekanan pendapatan yang paling besar kepada kelompok rumah tangga pengusaha tani. Dari pola kecenderungan semacam ini maka dapat disimpulkan bahwa efek *multiplier* kegiatan ekonomi yang terjadi di Jawa Tengah lebih “memihak” kepada rumah tangga golongan menengah ke atas.

Tabel 5.4.
Angka Pengganda Global
Yang Diterima Rumah Tangga di Jawa Tengah 2004

No SNSE	Kelompok Rumah Tangga	Multiplier		
		Faktor Produksi	Institusi	Sektor Produksi
11	Rumah Tangga Buruh Tani	1,7848	1,8867	0,6376
12	Rumah Tangga Pengusaha Tani	4,7895	2,9634	1,7174
13	Rumah Tangga Golongan Rendah di Pedesaan	2,2405	2,0245	0,7722
14	Rumah Tangga Golongan Atas di Pedesaan	1,8617	1,7605	0,6789
15	Rumah Tangga Golongan Rendah di Perkotaan	2,8908	2,2147	1,0445
16	Rumah Tangga Golongan Atas Perkotaan	3,7951	2,5142	1,4269
	Rata-rata	2,8937	2,2273	1,0462

Sumber : Tabel SNSE Jawa Tengah Tahun 2004 (diolah)

Sementara tekanan langsung kegiatan ekonomi terhadap blok institusi/pendapatan rumah tangga di Jawa Tengah paling besar dipengaruhi oleh blok faktor produksi dengan angka pengganda rata-rata sebesar 2,8937, kemudian blok institusi sebesar 2,2273 dan yang terakhir blok sektor produksi dengan angka

pengganda sebesar 1,0462. Dengan demikian apabila terdapat peningkatan pengeluaran dari blok faktor produksi sebesar Rp. 1 milyar maka akan berdampak pada kenaikan pendapatan rata-rata pada rumah tangga di Jawa Tengah sebesar Rp. 2,9 milyar.

Besarnya tekanan faktor produksi terhadap blok institusi, menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan rumah tangga di Jawa Tengah lebih banyak dipengaruhi oleh kegiatan yang ada di blok faktor produksi.

5.3.3. Analisis Dekomposisi Matriks

Untuk melihat pola distribusi dengan lebih terperinci dari tiap-tiap tahapan dalam sistem perekonomian, pengganda neraca (M_a) dapat diuraikan menjadi pengganda *transfer*, pengganda *open loop* dan pengganda *closed loop* (Edy Suratman, 2003). Dekomposisi terhadap pengganda neraca di atas menunjukkan bahwa sebenarnya pengaruh global dari suatu sektor terhadap sektor yang lain tidak terjadi begitu saja melalui pengganda M_a , melainkan terjadi melalui banyak tahapan. Tahapan-tahapan pengaruh tersebut dikelompokkan menjadi tiga: M_{a1} (*transfer*), M_{a2} (*open loop*) dan M_{a3} (*closed loop*).

5.3.3.1. Pengganda *Transfer*

Pengganda *Transfer* (M_{a1}) menunjukkan pengaruh dari satu blok pada dirinya sendiri (Edy Suratman, 2003). Dalam hal ini sektor-sektor dalam blok institusi akan memberikan tekanan terhadap rumah tangga di Jawa Tengah, baik itu dari perusahaan, pemerintah, maupun dari rumah tangga di dalam

lingkup blok institusi itu sendiri. Pegganda *Transfer* setiap sektor dalam blok institusi terhadap rumah tangga di Jawa Tengah dapat diamati pada tabel 5.5.

Tabel 5.5.
Angka Pegganda *Transfer*
Yang Diterima Rumah Tangga di Jawa Tengah 2004

No	Kelompok Rumah Tangga	Multiplier
11	Rumah Tangga Buruh Tani	1,2166
12	Rumah Tangga Pengusaha Tani	1,1141
13	Rumah Tangga Golongan Rendah di Pedesaan	1,1913
14	Rumah Tangga Golongan Atas di Pedesaan	1,0188
15	Rumah Tangga Golongan Rendah di Perkotaan	1,1268
16	Rumah Tangga Golongan Atas Perkotaan	1,0263
	Rata-rata	1,1157

Sumber : Tabel SNSE Jawa Tengah Tahun 2004 (diolah)

Pada tabel 5.5. menunjukkan bahwa angka pegganda *Transfer* terbesar adalah rumah tangga buruh tani dengan angka pegganda sebesar 1,2166 dan yang terkecil adalah rumah tangga golongan atas pedesaan yakni sebesar 1,0188. Dengan demikian apabila terdapat injeksi dari aktivitas eksogen sebesar Rp. 1 milyar yang diarahkan secara keseluruhan kepada blok institusi maka akan memberikan tekanan pendapatan kepada rumah tangga buruh tani sebesar Rp. 1,2 milyar. Hanya saja apabila dicermati secara keseluruhan, dari angka pegganda *Transfer* yang ada sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang

signifikan antar kelompok rumah tangga. Nilai rata-rata pengganda *Transfer* antar rumah tangga dalam blok institusi adalah sebesar 1,1157.

Pada tabel 5.6. menunjukkan bahwa tekanan *Transfer* terhadap blok institusi secara keseluruhan paling besar pada rumah tangga pengusaha tani yaitu sebesar 1,0878 dan terendah diperoleh rumah tangga buruh tani sebesar 1,0246. Dengan demikian apabila terdapat peningkatan pengeluaran dari kegiatan ekonomi sebesar Rp. 1 milyar maka akan memberikan tekanan pendapatan kepada rumah tangga pengusaha tani sebesar Rp. 1,08 milyar.

Tabel 5.6.
Tekanan *Transfer*
Yang Diterima Rumah Tangga di Jawa Tengah 2004

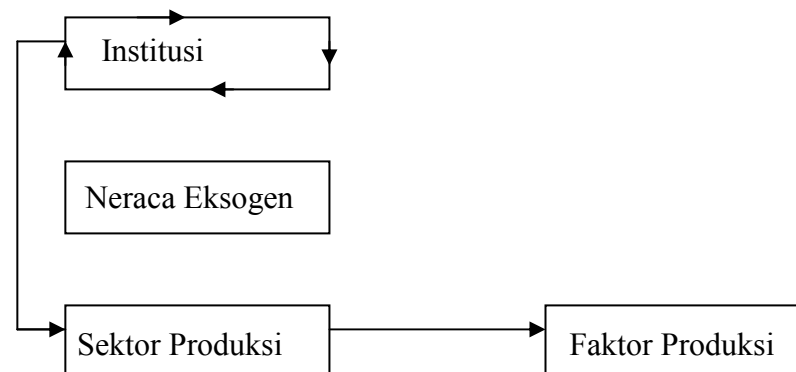
No	Kelompok Rumah Tangga	Multiplier
11	Rumah Tangga Buruh Tani	1,0246
12	Rumah Tangga Pengusaha Tani	1,0878
13	Rumah Tangga Golongan Rendah di Pedesaan	1,0689
14	Rumah Tangga Golongan Atas di Pedesaan	1,0768
15	Rumah Tangga Golongan Rendah di Perkotaan	1,0683
16	Rumah Tangga Golongan Atas Perkotaan	1,0709
17	Perusahaan	0,1010
18	Pemerintah	0,1956

Sumber : Tabel SNSE Jawa Tengah Tahun 2004 (diolah)

5.3.3.2. Pegganda *Open Loop*

Pegganda open loop (M_{a2}) atau disebut juga *cross effect*, merupakan matrik yang dapat menjelaskan pengaruh suatu sektor terhadap sektor. Injeksi pada salah satu sektor dalam sebuah blok tertentu akan berpengaruh terhadap sektor lain di blok yang lain setelah melalui keseluruhan sistem dalam blok lain tersebut.

Gambar 5.1.
Pengaruh *Open Loop* injeksi pada Institusi terhadap kegiatan ekonomi



Sumber : Idham Cholid (2003)

Pada analisis pertama angka pegganda *open loop* dari faktor produksi adalah dengan menghitung besarnya angka pegganda akibat dari adanya kegiatan ekonomi dari faktor produksi yang mempengaruhi blok institusi, terutama dari sisi penerimaan pendapatan rumah tangga di Jawa Tengah. Sedangkan pada analisis kedua didapat angka pegganda akibat dari adanya kegiatan ekonomi dari sektor produksi yang mempengaruhi pendapatan rumah

tangga dalam blok institusi. Pegganda *open loop* secara keseluruhan, baik dari faktor produksi maupun dari sektor produksi dapat dilihat dalam tabel 5.7.

Tabel 5.7.
Angka Pegganda *Open Loop*
Yang Diterima Rumah Tangga di Jawa Tengah 2004

No	Kelompok Rumah Tangga	Multiplier	
		Faktor Produksi	Sektor Produksi
11	Rumah Tangga Buruh Tani	0,9660	0,2291
12	Rumah Tangga Pengusaha Tani	2,4986	0,6048
13	Rumah Tangga Golongan Rendah di Pedesaan	1,2091	0,2788
14	Rumah Tangga Golongan Atas di Pedesaan	0,9385	0,2513
15	Rumah Tangga Golongan Rendah di Perkotaan	1,5653	0,3601
16	Rumah Tangga Golongan Atas Perkotaan	1,9767	0,4869
	Rata-rata	1,5257	0,3685

Sumber : Tabel SNSE Jawa Tengah Tahun 2004 (diolah)

Dari hasil perhitungan menunjukkan bahwa tekanan *Open Loop* baik yang berasal dari faktor produksi maupun sektor produksi paling besar ditunjukkan oleh rumah tangga pengusaha tani. Sementara angka pegganda terendah diperoleh rumah tangga golongan atas di pedesaan. Besarnya angka pegganda *Open Loop* yang dimiliki rumah tangga pengusaha tani memiliki arti bahwa apabila terdapat injeksi dari aktivitas eksogen yang diarahkan ke blok institusi sektor tersebut akan memberikan tekanan pendapatan yang paling besar kepada rumah tangga pengusaha tani.

Angka pengganda *Open Loop* yang diterima rumah tangga Jawa Tengah yang terbentuk atas keterkaitan antar blok paling besar berasal dari faktor produksi yaitu sebesar 1,5257, sementara yang berasal dari sektor produksi hanya sebesar 0,3685. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aktifitas ekonomi pada faktor produksi lebih berperan dalam meningkatkan pendapatan rumah tangga di Jawa Tengah dibandingkan dengan aktifitas ekonomi di sektor produksi.

Tabel 5.8.
Tekanan Pengganda *Open Loop*
Yang Diterima Rumah Tangga di Jawa Tengah 2004

Faktor Produksi		Sektor Produksi	
Kode SNSE	Multiplier	Kode SNSE	Multiplier
1.	1,0678	19.	0,3337
2.	1,0776	20.	0,5966
3.	1,0673	21.	0,2065
4.	1,0764	22.	0,5146
5.	1,0677	23.	0,5596
6.	1,0748		
7.	1,0664		
8.	1,0723		
9.	0,4705		
10.	0,1135		

Sumber : Tabel SNSE Jawa Tengah Tahun 2004 (diolah)

Pada tabel 5.8. menunjukkan bahwa faktor produksi yang memberikan tekanan paling besar terhadap rumah tangga Jawa Tengah adalah berasal dari sektor 2 dalam kode SNSE yaitu tenaga kerja pertanian bukan penerima upah & gaji yaitu sebesar 1,0776. Sedangkan terendah berasal dari sektor 10 dalam

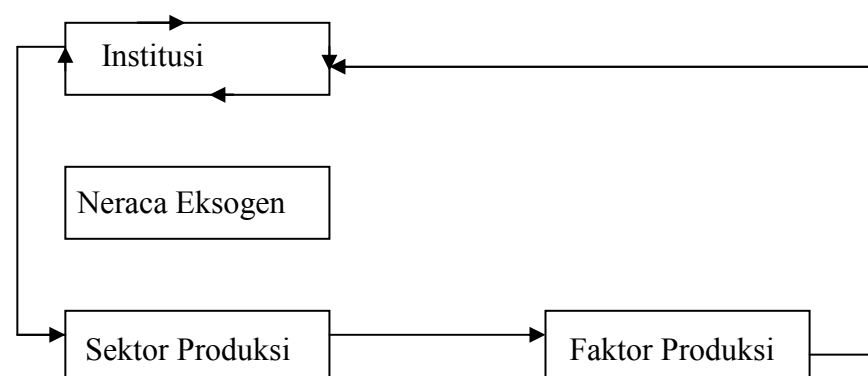
kode SNSE, yaitu modal pemerintah dan asing yaitu sebesar 0,1135. Dengan demikian apabila terdapat injeksi dari aktivitas eksogen sebesar Rp. 1 milyar yang diarahkan terhadap tenaga kerja pertanian bukan penerima upah & gaji maka akan memberikan tekanan pendapatan kepada rumah tangga Jawa Tengah sebesar Rp. 1,07 milyar.

Sedangkan kegiatan produksi yang paling besar tekanan *Open Loop* nya terhadap rumah tangga Jawa Tengah adalah sektor 20 dalam kode SNSE yaitu pertanian tanaman lainnya, kehutanan dan perburuan yaitu sebesar 0,5966. Sedangkan yang terendah adalah sektor 21 dalam kode SNSE yaitu Pertambangan, industri pengolahan kecuali makanan, listrik, gas dan air minum dengan angka pengganda sebesar 0,2065.

5.3.3.3. Pengganda *Close Loop*

Pada matrik *Close Loop* sebuah injeksi akan berdampak pada blok itu sendiri setelah mempengaruhi blok-blok lain. Misalkan dilakukan injeksi pada blok institusi maka akan berdampak pada blok sektor produksi, blok faktor produksi dan kembali pada blok semula yaitu blok institusi.

Gambar 5.2.
Pengaruh *Close Loop* Injeksi pada Institusi terhadap kegiatan ekonomi



Hasil perhitungan matriks *Close Loop* menunjukkan bahwa angka pengganda *Close Loop* terbesar terdapat pada rumah tangga pengusaha tani yakni sebesar 2,5985 dan terendah diperoleh rumah tangga buruh tani yakni sebesar 1,5763.

Tabel 5.9.
Angka Pengganda *Close Loop*
Yang Diterima Rumah Tangga di Jawa Tengah 2004

No	Kelompok Rumah Tangga	Multiplier
11	Rumah Tangga Buruh Tani	1,5763
12	Rumah Tangga Pengusaha Tani	2,5985
13	Rumah Tangga Golongan Rendah di Pedesaan	1,7201
14	Rumah Tangga Golongan Atas di Pedesaan	1,6425
15	Rumah Tangga Golongan Rendah di Perkotaan	1,9344
16	Rumah Tangga Golongan Atas Perkotaan	2,2792
	Rata-rata	1,9585

Sumber : Tabel SNSE Jawa Tengah Tahun 2004 (diolah)

Dengan demikian apabila terdapat injeksi dari aktivitas eksogen sebesar Rp. 1 milyar yang diarahkan pada blok institusi maka akan memberikan tekanan pendapatan kepada rumah tangga pengusaha tani sebesar Rp. 2,6 milyar.

Sementara jika dilihat dari sisi tekanan yang diberikan oleh institusi secara keseluruhan kelompok rumah tangga buruh tani merupakan penyumbang tekanan *Close Loop* terbesar yaitu sebesar 1,9923. Komposisi pembentuk terendah adalah perusahaan dan pemerintah, yakni antara 0 dan 0,6328.

Tabel 5.10.
Tekanan Pengganda *Close Loop*
Yang Diterima Rumah Tangga di Jawa Tengah 2004

No	Kelompok Rumah Tangga	Multiplier
11	Rumah Tangga Buruh Tani	1,9923
12	Rumah Tangga Pengusaha Tani	1,8818
13	Rumah Tangga Golongan Rendah di Pedesaan	1,9064
14	Rumah Tangga Golongan Atas di Pedesaan	1,8032
15	Rumah Tangga Golongan Rendah di Perkotaan	1,8358
16	Rumah Tangga Golongan Atas Perkotaan	1,6988
17	Perusahaan	0
18	Pemerintah	0,6328

Sumber : Tabel SNSE Jawa Tengah Tahun 2004 (diolah)

5.3.4. Simulasi Analisis Dampak Pembangunan Fisik Jalur Jalan Lintas Selatan Terhadap *Output* Kegiatan Sektor Produksi di Jawa Tengah

Motode simulasi yang digunakan untuk analisis dampak pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) Jawa Tengah adalah dengan menempatkan biaya pembangunan JJLS sebagai injeksi (*shock*) pada perekonomian Jawa Tengah. Asumsi yang digunakan dalam simulasi *shock* adalah sebagai berikut :

1. Tabel SNSE Jawa Tengah yang tersedia adalah tahun 2004 sehingga basis analisis yang digunakan untuk mengestimasi adalah kinerja perekonomian Jawa Tengah tahun 2004.
2. Besarnya kebutuhan biaya pembangunan JJLS sebesar Rp. 1.488.595.344.558. Nilai biaya inilah yang merupakan injeksi bagi perekonomian Jawa Tengah. Nilai injeksi ini diletakkan pada sektor Pertambangan, Industri Pengolahan Kecuali Makanan, Listrik, Gas dan Air Minum (Kode 21).

Pada tabel 5.11. menunjukkan bahwa dengan adanya pembangunan JJLS, akan memberikan dampak pada peningkatan *output* sebesar 0,86 % atau *output* bertambah senilai Rp. 3,83 trilliun sehingga total *output* yang dihasilkan dari kegiatan sektor produksi menjadi Rp. 446, 46 trilliun.

Tabel 5.11.
Hasil Perhitungan Simulasi Analisis Dampak Pembangunan Fisik JJLS
Terhadap *Output* Kegiatan Sektor Produksi di Jawa Tengah.
(Juta Rupiah)

Sektor Produksi	No	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Kenaikan	
				Nilai	%
Pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, industri makanan.	19	133.425.960,58	134.076.720,25	650.759,67	0,4877
Pertanian tanaman lainnya, kehutanan dan perburuan.	20	6.102.050,24	6.154.364,61	52.314,37	0,5873
Pertambangan, industri pengolahan kecuali makanan, listrik, gas dan air minum.	21	179.509.438,66	181.837.137,15	2.327.698,49	1,2967
Perdagangan, restoran & perhotelan, pengangkutan & komunikasi, jasa perseorangan & RT.	22	86.185.051,51	86.751.433,84	566.382,33	0,6572
Lembaga keuangan, real estate, pemerintah, jasa sosial & kebudayaan, jasa hiburan.	23	37.404.089,03	37.635.970,88	231.881,85	0,6199
TOTAL		442.626.590,02	446.455.626,72	3.829.036,7	0,8651

Sumber : Tabel SNSE Jawa Tengah Tahun 2004 (diolah).

Dari perhitungan simulasi tersebut menunjukkan bahwa : Pertama, sektor produksi Pertambangan, industri pengolahan kecuali makanan, listrik, gas dan air serta sektor produksi Pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, industri makanan merupakan sektor produksi yang memiliki nilai kenaikan *output* yang paling besar. Kedua sektor produksi Pertambangan, industri pengolahan kecuali makanan, listrik, gas dan air merupakan sektor yang memiliki tingkat kenaikan yang paling tinggi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah akan memberikan pengaruh pada : (1) terakselerasikannya kegiatan sektor produksi Pertambangan, industri pengolahan kecuali makanan, listrik, gas dan air minum di Jawa Tengah, (2) menstabilkan posisi kegiatan sektor produksi Pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, industri makanan sebagai sektor basis bagi perekonomian Jawa Tengah.

5.3.5. Simulasi Analisis Dampak Pembangunan Fisik Jalur Jalan Lintas Selatan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Di Jawa Tengah

Metode dan asumsi yang digunakan untuk menganalisis dampak pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan terhadap pendapatan rumah tangga di Jawa Tengah sama dengan analisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap *output* kegiatan sektor produksi.

Berdasarkan hasil perhitungan simulasi menunjukkan bahwa pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah akan memberikan dampak pada peningkatan pendapatan rumah tangga di Jawa Tengah sebesar 0,73%, yaitu dari sebesar Rp.156,74 trilliun berubah menjadi sebesar Rp. 157,9 trilliun.

Tabel 5.12.
Simulasi Dampak Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan
Terhadap Pendapatan Rumah Tangga di Jawa Tengah.
(Juta Rupiah)

Kelompok RT	No	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Kenaikan	
				Nilai	%
Rumah Tangga Buruh Tani	11	16.124.860	16.240.224,79	115.363,76	0,7154
Rumah Tangga Pengusaha Tani	12	42.712.580	43.018.711,18	306.127,01	0,7167
Rumah Tangga Golongan Rendah di Pedesaan	13	19.899.130	20.034.056,77	134.929,04	0,6781
Rumah Tangga Golongan Atas di Pedesaan	14	16.198.910	16.307.191,88	108.284,40	0,6685
Rumah Tangga Golongan Rendah di Perkotaan	15	26.284.920	26.484.668,79	199.747,24	0,7599
Rumah Tangga Golongan Atas Perkotaan	16	35.533.688	35.819.513,57	285.825,45	0,8044
TOTAL		156.754.090	157.904.366,98	1.150.276,98	0,7338

Sumber : Tabel SNSE Jawa Tengah Tahun 2004 (diolah).

Dari peningkatan pendapatan yang terjadi akibat dampak pembangunan JJLS, nilai kenaikan terbesar dialami oleh rumah tangga pengusaha tani dan rumah tangga golongan atas perkotaan. Hal ini berarti bahwa kebijakan pembangunan ekonomi di provinsi Jawa Tengah lebih banyak "dinikmati" oleh masyarakat golongan menengah ke atas.

Sementara bila dilihat *share* nya di tiap-tiap kelompok rumah tangga, apabila dibandingkan pada kondisi awal dan kondisi akhir, posisinya tidak mengalami perbedaan. Perubahan yang terjadi hanya pada penurunan dan kenaikan *share* yang dialami oleh masing-masing golongan. Golongan rumah tangga yang mengalami kenaikan *share* adalah Rumah Tangga Golongan Rendah Perkotaan dan Rumah Tangga Golongan Atas Perkotaan. Dengan demikian kebijakan pembangunan ekonomi di provinsi Jawa Tengah lebih banyak ”dinikmati” oleh masyarakat perkotaan.

Tabel 5.13.
***Share* Distribusi Pendapatan**
Masing-Masing Golongan Rumah Tangga
(%)

Rumah Tangga	No	Kondisi Awal	Kondisi Akhir	Selisih
Rumah Tangga Buruh Tani	11	10,28672	10,28485	-0,00188
Rumah Tangga Pengusaha Tani	12	27,24815	27,24352	- 0,00462
Rumah Tangga Golongan Rendah di Pedesaan	13	12,69449	12,68746	- 0,00702
Rumah Tangga Golongan Atas di Pedesaan	14	10,33396	10,32726	- 0,00670
Rumah Tangga Golongan Rendah di Perkotaan	15	16,76825	16,77260	0,00435
Rumah Tangga Golongan Atas Perkotaan	16	22,66843	22,68431	0,01588

Sumber : Tabel SNSE Jawa Tengah Tahun 2004 (diolah)

5.3.6. Simulasi Analisis Dampak Pembangunan Fisik Jalur Jalan Lintas Selatan Terhadap Tingkat Kesenjangan Pendapatan Rumah Tangga Di Jawa Tengah

Untuk mengetahui dampak pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan terhadap tingkat kesenjangan pendapatan rumah tangga di Jawa Tengah maka harus membandingkan variasi distribusi pendapatan rumah tangga Jawa Tengah antara sebelum dan sesudah adanya pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan.

Nilai yang dibandingkan dengan menggunakan uji statistik adalah nilai proporsi *share* dari tiap-tiap kelompok rumah tangga Jawa Tengah. Nilai proporsi *share* ini adalah data yang merepresentasikan tingkat perbedaan pendapatan antara kelompok rumah tangga di Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan nilai Z hitung adalah sebesar 0 karena nilai Z hitung $< 1,65$ maka H_0 diterima atau dengan kata lain uji hipotesis menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kesenjangan pendapatan antar rumah tangga di Jawa Tengah baik sebelum pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah maupun sesudah adanya Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Perekonomian provinsi Jawa Tengah berdasarkan data SNSE tahun 2004 memperlihatkan adanya : (1) keterkaitan antara sektor produksi terhadap faktor produksi dan, (2) keterkaitan antara sektor institusi terhadap faktor produksi. Dengan demikian jika pada faktor produksi terjadi perubahan, perubahan ini akan memberikan tekanan yang signifikan pada sektor produksi dan sektor institusi. Berdasarkan data SNSE Jawa Tengah tahun 2004, struktur faktor produksi di Jawa Tengah 64,8% di antaranya adalah faktor produksi tenaga kerja.

Kemudian berdasarkan hasil simulasi yaitu melakukan injeksi atas pembiayaan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan terhadap *Ma (Multiplier Accounting)*, menunjukkan beberapa temuan bahwa :

1. Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah akan memberikan dampak peningkatan *output* yang relatif lebih besar nilainya pada sektor produksi : (1) Pertambangan, industri pengolahan kecuali makanan, listrik, gas dan air minum. (2) Pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, industri makanan.
2. Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah akan memberikan dampak peningkatan pendapatan yang relatif lebih besar pada : (1) rumah tangga pengusaha tani. (2) rumah tangga golongan atas perkotaan.

3. Dampak ekonomi Pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah lebih banyak dinikmati oleh kelompok rumah tangga menengah ke atas dan kelompok rumah tangga perkotaan.

6.2 Rekomendasi

Berpijak dari hasil temuan di atas maka agar kebijakan pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah dapat memberikan manfaat atau berdayaguna secara optimal dan merata bagi perekonomian Jawa Tengah maka **pertama**, proyek pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah perlu segera dilanjutkan dengan proyek pengkoneksian jalan-jalan kabupaten-kabupaten yang terlintasi JJLS. **Kedua**, kabupaten-kabupaten yang terlintasi JJLS perlu segera memperbaiki jalan lingkungan/desa untuk kemudian dikoneksikan dengan JJLS. Terkoneksinya jalan desa dengan JJLS akan semakin mengakselerasikan kegiatan sentra-sentra ekonomi/pertanian yang ada di desa-desa.

Rekomendasi ini menurut penulis sangat relevan karena :

1. Sektor produksi yang memiliki angka pengganda global adalah kegiatan sektor produksi : Pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, industri makanan
2. Kegiatan di blok faktor produksi memiliki pengaruh yang paling besar bagi kegiatan sektor produksi dan peningkatan pendapatan rumah tangga di Jawa Tengah.
3. Peningkatan pendapatan akibat dampak dari pembangunan Jaringan Jalan Lintas Selatan Jawa Tengah lebih banyak dinikmati oleh kelompok rumah

tangga golongan menengah ke atas serta oleh kelompok rumah tangga yang berada di kota.

6.3. Keterbatasan Studi

Studi ini menggunakan SNSE Jawa Tengah tahun 2004. Sistem Neraca Sosial Ekonomi sendiri memiliki sifat yang statis. Artinya penelitian yang berbasis data SNSE, hanya bisa mengevaluasi kondisi yang terjadi pada masa-masa sebelumnya. Selain itu penelitian ini dengan menggunakan SNSE lebih cocok untuk menganalisa distribusi pendapatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alan Ibnu Wibowo.2006. **Dampak Investasi Jawa Tengah Dalam Pengembangan Blok Cepu Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Jawa Tengah**. Fakultas Ekonomi Undip. Skripsi (tidak dipublikasikan).
- Bambang Kustituantio dan Tjohar Julianto. 2001. **Pengaruh Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu Pada Penerimaan Daerah Sendiri di Jawa Tengah. Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 1994 -1999**. Yogyakarta : Jurnal Kompak, No.3 September 2001.
- BAPPENAS. 2006. **Perumusan Strategi Pembangunan dan Pembiayaan Infrastruktur Berskala Besar**. Jakarta : BAPPENAS
- Biro Pusat Statistik. 1996. **PDRB Propinsi-Propinsi Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, 1993-1995**. Jakarta:BPS.
- Biro Pusat Statistik. 2002. **PDRB Propinsi-Propinsi Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, 1999-2001**. Jakarta : BPS.
- Biro Pusat Statistik. 2004. **PDRB Propinsi-Propinsi Di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, 2001-2003**. Jakarta : BPS.
- Biro Pusat Statistik. 2006. **Sistem Neraca Sosial Ekonomi Jawa Tengah 2004**, Semarang : BPS –BAPPEDA JATENG.
- Boediono. 1999. **Ekonomi Makro**. Yogyakarta : Edisi 19, BPFE.
- Chenary, et al. 1974. **Redistribution With Growth**. London : Oxford University Press.
- Dergibson Siagian. 2003. **Teknik Sampling**. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Diana Wijayanti. 2004. **Analisis Kesenjangan Pembangunan Regional Indonesia, 1992 – 2001**. Yogyakarta : Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.9. No.2, 2004.
- Dumairy. 1996. **Perekonomian Indonesia**. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Edy Suandi Hamid. 1999. **Peran dan Intervensi Pemerintah Dalam Perekonomian**, Jakarta : Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.1. No.1. Tahun 1999.

- Endah Saptutyningasih. 2003. **Dampak Perubahan Pengeluaran Wisatawan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Di Indonesia: Pendekatan Structural Path Analysis (SPA) Dalam SNSE Indonesia.** Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 8, No.1 Juni 2003.
- Firmansyah. 2004. **Analisis Pola Pendapatan Rumah Tangga Pertanian Pra dan Pasca Terjadinya Krisis Ekonomi Di Indonesia: Aplikasi Multiplier Decomposition Pada Sistem Neraca Sosial-Ekonomi 1995-1999.** Yogyakarta : Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.5, No.1 Tahun 2004.
- Gunawan Sumodiningrat. 1996. **Perencanaan Pembangunan Dalam Penanggulangan Kemiskinan.** Jakarta : Prisma No. Khusus 25 Tahun (1971-1996) Tahun XXV.
- Haeruman. 1996. **Pembangunan Daerah dan Peluang Pemerataan Pembangunan Antar Daerah.** Jakarta : Prisma No. Khusus 25 Tahun (1971-1996) Tahun XXV.
- Hadi Prayitno. 1985. **Ekonomika Pembangunan.** Yogyakarta : Edisi 1, BPFE.
- Hera Susanti. Moh Ikhsan. Widyanti. 2000. **Indikator-Indikator Makro Ekonomi,** Jakarta : LPEM UI.
- Ibnu Subiyanto. 2006. Fungsi Dinamisator Dalam Penganggaran Daerah, Makalah Disampaikan Pada Konferensi **Responsive and Accountable Local Governance** Jakarta : Kerjasama LPEM UI dan World Bank.
- Irawan dan M Suparmoko. 1997. **Ekonomi Pembangunan.** Ed.6, Yogyakarta Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Univ. Gajah Mada.
- Jhingan, ML. 1990. **Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan.** Jakarta : CV. Rajawali.
- Jhingan, ML. 1995. **The Economic of Development and Planning.** Jakarta. 3rd ed, Terjemahan, PT. Rajawali Pers.
- Joyo Winoto dan Hermanto Siregar. **Peranan Pemabngunan Infrastruktur Dalam Menggerakkan Sektor Riil.** Jakarta : Jurnal Ekonomi Indoenesia. No.1 Juni 2006.
- Lincoln Arsyad. 1999. **Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah.** Yogyakarta : Edisi 1, BPFE.

- Lincoln Arsyad. 1997. **Ekonomi Pembangunan**. Ed. 3, Yogyakarta. Bagian Penerbitan STIE YKPN.
- Meier, Gerald M. 1995. **Leading Issues In Economic Development**. New York : Sixth Edition. Oxford University Press
- Mudrajad Kuncoro. 2004. **Otonomi dan Pembangunan Daerah**. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Munawar Ismail. 1995. **Pertumbuhan dan Pemerataan, Analisa Teori dan Bukti Empirik**. Jakarta : Prisma 1, Januari.
- Nasyith Majidi.1997. **Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi Antardaerah**. Jakarta : Prisma Vo.3 Maret 1997.
- Nudiatulhada Mangun. 2006. **Analisis dan Identifikasi Potensi Ekonomi Kabupaten dan Kota Di Propinsi Sulawesi Tengah**. Semarang. Usulan Tesis, MIESP Undip, Tidak Dipublikasi.
- Pemerintah Propinsi Jawa Tengah. 2004. **Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor :11 Tahun 2003 Tentang Rencana Strategis Propinsi Jawa Tengah 2003-2008**. Semarang.
- Purbaya Y Sadewa dan Edwin Syahrudad. 2004. **Urgensi Membangun Jalan Tol Guna Mempercepat Pemulihan Ekonomi**. Jakarta : Kompas 29 Maret 2004.
- Pyatt, Graham and Jefry I, Round. 1988, "Accounting and Fixed-Price Multipliers in a Social Accounting Matrix Framework,". Dalam Graham Pyatt and Round (eds), **Social Accounting Matrices : A Basic for Planning**. Washinton D.C. USA.: The World Bank.
- Samuelson, Paul.A, and Nordhaus, William D. 1992. **Macroeconomics**. McGraw-Hill Inc.
- Sjoberg, Peter. 2003. **Government Expenditures Effect on Economic Growth The Case of Sweden 1960 – 2001**.
- Socia Prihawantoro. 2002. Penggunaan Model SNSE Dalam Analisis Perekonomian Daerah. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi-Deputi Pengkajian Kebijakan Teknologi **Pengembangan Wilayah dan Otonomi Daerah Kajian Konsep dan Pengembangan**. Jakarta : Pusat Pengkajian Teknologi Pengembangan Wilayah.

- Soediyono Reksoprayitno. 1979. **Ekonomi Makro**. Yogyakarta : Liberty.
- Stiglitz, Joseph E. 1986. **Economic of Public Sector**, 3th Edition, WW. Norton & Company.
- Suharto. 2001. **Distribusi Pendapatan Dalam Pembangunan**. Yogyakarta : Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol.6. No.1, 2001.
- Suahazil Nazara. 2005. **Analisis Input-Output**. Jakarta. Edisi 2, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Suparmoko. 2002. **Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah**. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Syafrizal. 1997. **Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat**. Jakarta : Prisma Vo.3 Maret 1997.
- Thorbecke, Erik. 1998, The Social Accounting Matrix and Social Accounting Analysis In **Methods of Interregerional and Regional Analysis** W.Isard. I.J. Azis.M.P. Drennan R.E. Miller. S.Saltzman and E.Thoebecke. Ashgate. Aldershot.
- Todaro, Michael. P. 1989. **Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga**. Jakarta. PT Erlangga.
- Tulus Tambunan dan Kadin Indonesia. 2006. **Kondisi Infrastruktur Di Indonesia**. Jakarta : April.

Lampiran 1. SNSE Jawa Tengah Tahun 2004 27 x 27

Uraian		Uraian	Kode SNSE 27 x 27
Faktor Produksi	Tenaga Kerja	Pertanian penerima upah dan gaji	1
		Pertanian bukan penerima upah dan gaji	2
		Produksi, operator alat angkutan, manual & buruh kasar penerima upah gaji	3
		Produksi, operator alat angkutan, manual & buruh kasar bukan penerima upah gaji	4
		Tata usaha, penjualan, jasa-jasa penerima upah gaji	5
		Tata usaha, penjualan, jasa-jasa bukan penerima upah gaji	6
		Kepemimpinan, ketatalaksanaan, militer, profesional dan teknisi penerima upah gaji	7
		Kepemimpinan, ketatalaksanaan, militer, profesional dan teknisi bukan penerima upah gaji	8
	Bukan TK	Modal swasta dalam negeri	9
		Modal pemerintah dan asing	10
Institusi	Rmh Tangga	Buruh Tani	11
		Pengusaha Pertanian	12
		Pengusaha bebas golongan rendah, tenaga TU, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan, jasa perorangan, buruh kasar, bukan angkatan kerja & golongan tidak jelas di desa	13
		Pengusaha bebas golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer, militer, profesional Teknisi, guru, pekerja TU & penjualan golongan atas di desa	14
		Pengusaha bebas golongan rendah, tenaga TU, pedagang keliling, pekerja bebas sektor angkutan, jasa perorangan, buruh kasar, bukan angkatan kerja & golongan tidak jelas di kota	15
		Pengusaha bebas golongan atas, pengusaha bukan pertanian, manajer, militer, profesional Teknisi, guru, pekerja TU & penjualan golongan atas di kota	16
	Perusahaan	Perusahaan	17
	Pemerintah	Pemerintah	18
Sektor Produksi		Pertanian tanaman pangan, peternakan, perikanan, industri makanan	19
		Pertanian tanaman lainnya, kehutanan dan perburuan	20
		Pertambangan, industri pengolahan kecuali makanan, listrik, gas dan air minum	21
		Perdagangan, restoran & perhotelan, pengangkutan & komunikasi, jasa perseorangan dan RT	22
		Lembaga keuangan, real estate, pemerintah, jasa sosial & kebudayaan, jasa hiburan	23
Komoditi Impor	Komoditi Impor	24	
Neraca kapital	Neraca kapital	25	
pajak tdk lgsg min subsi	Pajak tidak langsung minus subsidi	26	
Luar negeri	Luar negeri	27	